Kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran

Risa Stevi Anggraini

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112-114, Bandung, 40132, Indonesia

E-mail : risa.stevi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui Kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran. Peneliti menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan UNWTO dalam mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM di Pangandaran pasca tsunami yang terjadi di Pangandaran pada tahun 2006.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelelusuran data online, dokumentasi, dan wawancara. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan pendekatan teori yang berhubungan dengan Ilmu Hubungan Internasional.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini diantaranya ditunjang oleh teori-teori sebagai berikut yaitu Teori Kerjasama Internasional, Organisasi Internasional, Isu Lingkungan Hidup, dan Pariwisata Berkelanjutan

Hasil penelitian menujukan bahwa Indonesia dengan UNWTO telah melakukan kerjasama sebagai sebuah Negara dengan Organisasi Internasional yang berfokus terhadap upayanya dalam mengembangkan pariwisata hijau, dan memilih Pangandaran sebagi model percontohan program *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) atau Pariwisata Berkelanjutan melalui Energi Efisiensi dengan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi yang merupakan model inovasi kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi yang mengadopsi pendekatan energi efisiensi sekaligus menguatkan struktur lokal menuju pengelolaan destinasi yang berkelanjutan.

Abstract

This study was to determine The Cooperation between Indonesia - United Nations World Tourism Organization (UNWTO) in effort to develop green tourism through Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures (STREAM) in Pangandaran. Researchers analyzed the various efforts made by Indonesia with UNWTO in developing green tourism through STREAM program in Pangandaran after the tsunami in Pangandaran in 2006.

Author of the research methods used in this study is descriptive qualitative analysis method, aiming to describe the facts relating to the problem under study. Most of the data collected through library research, online data retrieval, documentation, and interviews. The data was then analyzed with a theoretical approach related to International Relations.

Framework in this study are supported by the following theories are theories of International Cooperation, International Organizations, Environmental Issues and Sustainable Tourism.

The results showed that Indonesia with UNWTO has been cooperating as a State with the International Organization focused on its efforts in developing green tourism, and choose Pangandaran as a pilot model Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures (STREAM) program which is a model of innovation activities of adaptation and mitigation that adopt energy efficiency as well as strengthen local structures towards sustainable destination management.

Keywords: WFP, FFA, *International Organizations, Food Insecurity, West Nusa Tenggara*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika studi hubungan internasional terdapat berbagai isu kontemporer yang pada awalnya lebih bersifat kepada hal yang teknis, yang kemudian berkembang menjadi agenda politik yang berimplikasi pada lahirnya pola-pola baru kerjasama internasional, dimana dalam perkembangan hubungan internasional terkini tidak lagi hanya memperhatikan aspek hubungan antara negara saja, yang hanya mencakup aspek politik, ekonomi, budaya serta aspek-aspek klasik lainnya, tetapi juga aspek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, keamanan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional dan juga masalah lingkungan hidup (http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10 Diakses pada 23 Februari 2015).

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa isu lingkungan menjadi salah satu fokus penting dalam hubungan internasional. *Pertama*, beberapa masalah lingkungan hidup sudah menjadi permasalahan global. Seperti emisi gas yang menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia. *Kedua*, beberapa masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya yang dimiliki bersama. Contohnya jika pembuangan limbah dilakukan di laut perbatasan dua negara tentu dampaknya juga akan mengenai kedua negara tersebut. *Ketiga*, banyak masalah lingkungan yang sifatnya transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah. *Keempat*, meskipun permasalahnnya hanya tingkat lokal, namun dialami lintas negara. *Kelima*, permasalahan lingkungan berkaitan juga dengan ekonomi-sosial maupun politik (Greene, 2001:387-414).

Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan menjadi permasalahan bersama. Upaya untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda karena ini adalah permasalahan bersama. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang dilakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi kelak.

Lingkungan dijadikan basis pengembangan hampir keseluruhan industri, dan pariwisata merupakan salah satu industri yang tidak luput dari tuntunan aplikasi pengembangan industri berwawasan pemeliharaan alam (konservasi) yang *sustainable* (berkelanjutan). Pada dasarnya kegiatan pariwisata harus ditunjang dengan lingkungan yang baik. Hal ini penting karena, setiap orang yang berpergian dari suatu daerah ke daerah tujuan wisata ingin menikmati lingkungan, seperti pemandangan alam, atraksi budaya, arsitektur, makanan dan minuman, benda seni, dan lainnya yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Sektor pariwisata sebagai industri jasa merupakan sektor yang sangat peka terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran limbah domestik, kumuh, adanya gangguan terhadap wisatawan, penduduk yang kurang atau tidak bersahabat, kesemerautan lalu lintas, kriminalitas, dan lain-lain, akan dapat mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Oleh karena itu pengembangan pariwisata harus menjaga kualitas lingkungan (Soemarwoto, 2001:34).

Kualitas lingkungan meliputi kualitas bentang alam atau pemandangan alamiah itu sendiri. Kualitas ini dapat menurun karena aktivitas manusia. Menurut hukum permintaan wisata, kualitas lingkungan merupakan bagian integral dari suguhan-suguhan alamiah. Dengan demikian, pemeliharaan terhadap kualitas lingkungan menjadi syarat mutlak bagi daya tahan terhadap kompetisi pemilihan tujuan wisata oleh wisatawan. Jika kualitas lingkungan suatu daerah tujuan wisata menurun, maka tempat tersebut cenderung diabaikan (http://www.academia.edu/8776867/ Diakses pada 23 Februari 2015).

Pariwisata menjadi salah satu industri yang tumbuh dominan dan memiliki peran penting dalam aspek kehidupan manusia. Dalam ranah pariwisata muncul isu mengenai *Greenspeak* dan *Go Green* dan salah satunya masuknya *Green Tourism*. Isu ini berkaitan erat dengan wisata yang berbasis pemeliharaan dan pelestarian alam (http://www.goblue.or.id/kategori/berita/page/112 Diakses pada 27 Febuari 2015).

Organisasi Pariwisata Dunia (*United Nations World Tourism Organisation* - UNWTO) pada tahun 2002 memprediksi, bahwa ditahun 2020 sebanyak 1,5 milyar turis akan menghabiskan US$ 2 trilyun atau lebih dari US$ 5 milyar setiap hari. Pariwisata menyumbang lebih dari 10 persen dari total GNP (*Gross National Product*) dunia dan secara langsung maupun tak langsung menampung sekitar 200 juta pekerja baru. Secara global maupun dalam skala nasional, pariwisata merupakan sektor ekonomi penting yang bertumbuh cepat sampai hari ini dan menjadi kontributor GDP (*Gross Domestic Product*) dari berbagai negara terutama di negara berkembang yang memiliki pulau tropis. Seperti halnya di Karibia, 30 sampai 50 persen dari total pendapatannya bersumber dari pariwisata. UNWTO mengestimasi pendapatan dari sektor ini sekitar 25 persen dari total ekspor dari negara-negara sekitar Pasifik (*Pasific Rim*) dan lebih dari 35 persen khusus untuk kepulauan Karibia. Tidaklah sulit mengamati bagaimana daerah yang memiliki pulau tropis merupakan tujuan utama wisata dunia (http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3227/jurnal.pdf?sequence=1 Diakses pada 2 Maret 2015).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada dan merupakan pusat keanekaragaman flora dan fauna dunia (*Hotspot Sundaland, Walacea, Tropical Wildernes Papua* dan *Heart of Coral Triangle*). Pariwisata di wilayah pesisir dan laut bersumber pada nilai keanekaragaman hayati, karena semakin tinggi keanekaragaman maka semakin tinggi daya jualnya. Keunikan dan keindahan lingkungan alam tropis ini merupakan sumberdaya potensial penting yang kita miliki dibanding daerah dan negara lain. Maka dari itu objek pengembangan pariwisata telah bertumpu pada lingkungan ekosistem pesisir dan laut seperti aktifitas rekreasi. Sebagai *multiplier effect* bagi pembangunan kelautan, tentunya keberlanjutannya tak lepas dari ketergantungan usaha pariwisata terhadap lingkungan tersebut. Sehingga kelestarian sumberdaya dan keanekaragaman hayati di dalamnya perlu dipertahankan dan dijaga keberadaanya (http://www.academia.edu/7472124/Wawasan_Kemaritiman_Tinjauan_Ekonomi Diakses pada 5 Maret 2015).

Industri pariwisata umumnya didasarkan atas ketersediaan sumberdaya alam seperti udara, daratan dan air. Sumberdaya alam tersebut dijadikan obyek sekaligus produk bagi industri pariwisata. Pariwisata sangat tergantung pada kebersihan atau lingkungan yang asli dan alami. Hal ini mengarah pada argumen bahwa pariwisata harus di pelihara secara alami dengan konsep pembangunan berkelanjutan (http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2013/07/26/liburan-hijau-dengan-petualangan-ekowisata-bahari-pulau-serangan-denpasar/ Diakses pada 5 Maret 2015).

Semenjak hal tersebut dipromosikan untuk memproteksi dan melestarikan lingkungan, maka suksesnya pembangunan berkelanjutan khususnya pariwisata sangatlah bergantung pada kualitas lingkungan. Meskipun terdapat beberapa kategori pariwisata yang kurang hubungannya dengan lingkungan, tapi secara umum kenyamanan berwisata tetap tergantung pada lingkungan yang bersih baik di pemukiman maupun di pusat kota.

Dari tinjauan ekologis, hal ini pun secara langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan keberadaan lingkungan. Satu yang tak dapat dipungkiri bahwa pariwisata seperti berwisata di wilayah pesisir dan pulau memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan kebersihan air laut. Faktor-faktor lingkungan yang umum seperti keberadaan pantai dan matahari tropis yang hangat dapat menarik turis. Turis tidakakan datang kembali jika daerah tujuan tersebut telah tercemar, kotor dan tidak menarik lagi. Hal yang ditekankan, bahwa pariwisata sangat bergantung dan membutuhkan lingkungan yang besih, alami. Hal ini juga tentunya seiring dengan keinginan masyarakat yang menghendaki adanya kebersihan, ketertiban dan keharmonisan dengan lingkungan. Keteraturan, kebersihan kota dan lingkungannnya merupakan cermin dari masyarakat yang mendiaminya. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir yang menunjang kesimbangan sistem ekologis. Kombinasi dari hal tersebut juga tentunya akan mengguntungkan bagi keberlangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Semenjak awal tahun 1970, pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesatuan konsep untuk perencanaan lingkungan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaanya masih kurang dipahami. Konsep tersebut menjembatani hubungan antara konservasi lingkungan dan kualitas hidup sosial-ekonomi tetapi tetap meninggalkan isu perdebatan mengenai bagaimana keseimbangan pemanfaatan yang berkelanjutan atau bagaimana nilai suatu lingkungan. Berbagai organisasi dunia menyangkut pariwisata dan lingkungan menyepakati bahwa pariwisata hendaknya merangkul prinsip-prinsip berkelanjutan dengan menghargai daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), tanggung jawab sosial dan kesatuan aktifitas pariwisata dengan keinginan penduduk lokal. TC (*Tourism Concern*) dan WWF (*Worlwide Fund for Nature*) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan adalah sebagai pariwisata dan infrastrukturnya yang beroperasi dengan kapasitas alami untuk regenerasi dan masa depan produktifitas alam, sosial dan budaya (http://www.academia.edu/4938476/Bab_13_Pertumbuhan_Ekonomi_Dalam_Konsep_Pembangunan_Berkelanjutan_420 Diakses pada 7 Maret 2015).

Prinsip dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dinyatakan dengan penggunaan secara optimal sumberdaya alam dan budaya dalam kerangka keseimbangan dan menyokong pengembangan perekonomian nasional secara keseluruhan. Menyediakan kesan khusus bagi turis di satu sisi, dan disisi lain meningkatkan kualitas kehidupan penduduk lokal. Hal tersebut bisa dicapai dengan kerjasama permanen antara pemerintah, sektor swasta dan penduduk lokal. Pariwisata berkelanjutan adalah industri yang diusahakan menekan dampak negatif pada lingkungan dan budaya lokal, dengan membantu meningkatkan pendapatan, pekerjaan, dan konservasi ekosistem setempat. Hal ini merupakan pariwisata bertanggungjawab yang sensitif terhadap nilai-nilai ekologi dan budaya seperti *ecotourism*.

Salah satu bentuk dari pariwisata berkelanjutan adalah *green tourism* atau pariwisata hijau. *Green tourism* dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan pariwisata dengan orientasi ramah lingkungan, hemat energi, berefektifitas tinggi, dan mampu menterap, wisatawan yang banyak. *Green Tourism* juga adalah kegiatan wisata yang menitikberatkan pada kunjungan ke lokasi satwa liar misalnya ke taman nasional dan cagar alam. *Green tourism* juga dapat diartikan sebagai wisata yang berkelanjutan atau artinya tidak mengakibatkan kerusakan di lokasi wisata cagar budaya yang sedang dikunjungi. *Green tourism* mengusung idealisme ekoturisme berbasis konservasi. Ada enam

poin dari *green tourism* yang tercantum sebelumnya merupakan hasil adaptasi prinsip-prinsip dari TIES (*The International Ecoturism Society*). *Green tourism* seperti halnya *Ecotravel*, *Ecovacation*, *Ecoadventure*, *Eco - cruise*, *Eco – safari*, *Nature tourism* (wisata alam), *Low impact Tourism*, *Bio – tourism*, *Ecologically responsible tourism* memang biasa digunakan dalam istilah marketing bisnis pariwisata berbasis ekosistem (https://www.academia.edu/8963353/Green_tourism Diakses pada 6 April 2015).

Salah satu tempat pariwisata yang mengusung pariwisata hijau (*green tourism*) adalah Pangandaran. Pada tanggal 13 Juni 2011, Indonesia sepakat untuk melakukan kerjasama dengan UNWTO dalam merevitalisasi destinasi kawasan pariwisata Pangandaran melalui program STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran*) atau Pariwisata Berkelanjutan melalui Energi Efisiensi dengan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi di Pangandaran, yang merupakan model inovasi kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi yang mengadopsi pendekatan energi efisiensi sekaligus menguatkan struktur lokal menuju pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Program ini adalah bagian dari ICI (*International Climate Initiative*). *Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety* mendukung inisiatif ini berdasarkan keputusan yang disetujui oleh Parlemen Jerman (http://www.streamindonesia.org/ Diakses pada 18 maret 2015).

Pantai Pangandaran merupakan sebuah objek wisata andalan yang terletak di sebelah tenggara Jawa Barat, tepatnya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Objek wisata yang merupakan primadona pantai di Jawa Barat ini terletak di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dengan jarak kurang lebih 92 km arah selatan kota Ciamis (http://www.mypangandaran.com/ wisata/detail/5/pantai-pangandaran.html Diakses pada 18 Maret 2015).

Bencana gempa dan tsunami yang melanda daerah Pangandaran dan sekitarnya pada 17 Juli 2006 telah merusak dan menghancurkan destinasi kawasan pariwisata di Pangandaran, dan pantai Pangandaran merupakan kawasan yang paling parah di terjang gelombang tsunami. Akibatnya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran semakin menurun drastis. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada pendapatan masyarakat lokal yang memang bergantung pada obyek wisata ini, maupun dampaknya yang berimbas pada devisa negara. Hal ini yang melatarbelakangi UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) untuk memberikan bantuan.

Data yang peroleh dari BAPPENAS, pada tahun 2006, pasca tsunami, terdapat data korban bencana gempa dan tsunami. Diantaranya ialah, terdapat di kabupaten Ciamis, 405 orang meninggal, 274 orang mengalami luka-luka, 27 orang hilang dan 13.198 orang mengungsi (BAPPENAS, Data Kabupaten, 2006).

Selain korban jiwa, bencana gempa bumi dan tsunami di Pangandaran juga mengakibatkan kerusakan pada sarana dan prasarana wilayah, seperti rumah dan permukiman, jalan raya, tempat pelelangan ikan, pasar, hotel, prasarana pendidikan dan sebagainya. Sejumlah prasarana wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan infrastruktur di kawasan Pangandaran termasuk di Desa Pangandaran sebagai inti aktivitas pariwisata, mengalami kerusakan seperti jalan, jembatan, fasilitas umum dan sosial, warung, bangunan, dan lain lain.

Pasca Tsunami pemulihan kawasan pantai Selatan khususnya pangandaran terus dilakukan melalui dukungan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat serta pihak-pihak lainnya seperti insan pariwisata, masyarakat dan lembaga dunia UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*). Bencana gempa dan Tsunami di kawasan Pangandaran menjadi momentum atau dijadikan model percontohan untuk pengembangan pariwisata hijau. Konsep tersebut di usung oleh UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) yaitu sebuah lembaga kepariwisataan dunia dibawah PBB yang menaruh perhatian khusus kepada Negara-Negara yang memiliki destinasi wisata yang rusak akibat tsunami. Dan Pangandaran ditetapkan sebagai model program UNWTO di Indonesia.

UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) sendiri merupakan organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB yang muncul pada tahun 1970 dan bertujuan untuk memajukan pariwisata serta memanfaatkan yang diwakili oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai badan pemerintah Indonesia. Selain itu, program ini juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-profit lainnya, seperti Indecon, IESR, serta Adelphi sebagai tenaga ahli yang berbasis di Berlin, Jerman. Program ini pada dasarnya juga memiliki mitra lokal yang melibatkan partisipasi pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten Ciamis, LWG, Komite *Destination Management Organization* dan masyarakat Pangandaran (http://www.scribd.com/doc/166055290/Lakip-Kementerian-Pariwisata-Dan-Ekonomi-Kreatif-2012#scribd Diakses pada 15 Maret 2015).

Secara umum, program ini merupakan kelanjutan dari program UNWTO dengan Indecon. Sejak tahun 2007 pasca tsunami, UNWTO dengan Indecon telah bekerjasama dalam merevitalisasi kawasan wisata di Pangandaran, yang selanjutnya pemerintah Indonesia juga setuju untuk bekerjasama dengan UNWTO dalam kerangka kerja untuk membangun pariwisata berkelanjutan di Pangandaran. Program ini dimaksudkan untuk menjadi langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya (STREAM *brochure*).

Segala aktivitas pariwisata sangat bergantung pada iklim. Keterhubungan ini menuntut suatu destinasi pariwisata untuk meningkatkan ketahanannya terhadap dampak perubahan iklim, melalui tindakan-tindakan adaptasi dan mitigasi.Pembangunan di berbagai bidang di dunia mengarah pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.Pembangunan ini menitikberatkan pada tiga pilar kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, dan perlindungan lingkungan. Pentingnya pariwisata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di dunia tercermin pada hasil pertemuan tingkat kepala negara dalam forum G20 dan Rio+20. Pertemuan G20 yang berlangsung tanggal 18-19 Juni 2012 di Los Cabos, Meksiko, menghasilkan *Leaders*' *Declaration* yang secara eksplisit memasukkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Kemudian forum *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD) Rio+20 yang berlangsung tanggal 20-22 Juni 2012 di Rio De Janeiro, Brasil, juga menempatkan pariwisata sebagai sektor pendukung pembangunan berkelanjutan dan berperan penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (http://pariwisata.jogjakota.go.id/index/extra.detail/233 Diakses pada 18 Maret 2015).

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pariwisa dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), mempunyai sejumlah kebijakan di tingkat nasional yang mendukung pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu UU Pariwisata No 10 tahun 2009 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS 2010-2025). Kemenparekraf juga menjalin kerjasama dengan organisasi internasional yaitu UNWTO dalam menata kelola destinasi agar selalu mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, misalkan saja efisiensi energi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pekerjaan yang layak yang memperhatikan aspek lingkungan (*green jobs*). Pada dasarnya, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah lama diterapkan sejak nenek moyang kita, dimana masing-masing daerah memiliki nilai-nilai kelokalan tersendiri. Masyarakat lokal di Bali sudah sejak lama menerapkan falsafah hidup "Tri Hita Karana" (keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Sesamanya, dan Manusia dengan Alam) yang merupakan contoh nyata konsep pembangunan berkelanjutan (http://pariwisata.jogjakota.go.id/ Diakses pada 20 Maret 2015).

Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen tidak mengikat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 26% di tahun 2020 dan selanjutnya hingga 41% dengan dukungan keuangan internasional. Ini adalah komitmen terbesar yang dibuat oleh negara berkembang manapun didunia. Upaya-upaya mitigasi perubahan iklim adalah pilar utama untuk perwujudan komitmen tersebut. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pariwisata berkelanjutan, UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) membantu pengembangan pariwisata yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan ekonomi bagi negara-negara tuan rumah dan masyarakat di destinasi pariwisata (STREAM *brochure*).

Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran (STREAM) adalah program kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) dalam bidang pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan, yang dimaksudkan untuk menjadi model langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya.

Secara keseluruhan, program *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran* (STREAM) bertujuan untuk mengadopsidan melaksanakan pendekatan pengembangan pariwisatayang rendah emisi karbon dan dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau di Pangandaran. Hal ini dapatdiwujudkan dengan penerapan langkah-langkah mitigasidan adaptasi yang efektif dalam menghadapi perubahaniklim, termasuk kegiatan perlindungan daerah pesisir. Langkah-langkah baru yang akan dilaksanakan adalahpenerapan teknologi efisiensi energi dan energy terbarukan. Selain itu, kegiatan adaptasi untuk ekosistem pantai seperti rehabilitasi serta konservasi bakau dan terumbu karang akan dilaksanakan secara terpadu. Dalam upaya mencapai hasil yang optimal, program ini mencakup peningkatan kesadaran dan kapasitas untuk masyarakatdan para pemangku kepentingan di daerah. Program ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat setempat, seperti *Local Working Group* (LWG) dan *Komite Destination Management Organisation* (DMO). Hal ini diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan program. Pembelajaran dari program ini diharapkan untuk dapat diterapkan di destinasi pariwisata lainnya di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (STREAM *brochure*).

UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) mempromosikan *green tourism* sebagai salah satu obyek penarik wisatawan, sekaligus sebagai program untuk melestarikan alam. Rangkaian kegiatan yang dilakukan termasuk seminar, lokakarya, dan publikasi. *Green Tourism* merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Mengingat Indonesia memiliki banyak obyek wisata alam, hal tersebut dapat menjadi salah satu bidang kerjasama

Indonesia dengan UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*). Hal ini juga yang memfokuskan UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) pada pemanfaatan situs-situs budaya untuk mendukung pariwisata. Untuk itu UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) melakukan serangkaian kegiatan seperti penelitian di situs-situs budaya, seminar dan publikasi untuk mempromosikan situs budaya, serta penelitian lapangan untuk membantu pemerintah setempat memanfaatkan situs budayanya (http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2010/07/08/ekoturisme-dan-pemanfaatan-potensi-lokal-188481.html Diakses pada 22 maret 2015).

Pariwisata merupakan salah satu andalan Indonesia sebagai penghasil devisa, kerjasama di forum internasional dan regional seperti UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) dan *Pacific Asia Travel Assiociation* (PATA) sangatlah penting, terutama untuk menjalin kerja sama pelatihan, penanaman modal, dan tukar-menukar pengalaman. UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) memiliki *Business Council* yang beranggotakan badan-badan pariwisata non-pemerintah.

Kementerian Luar Negeri menyambut baik dukungan *Executive Council* UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) agar Masyarakat Pariwisata menjadi anggota UNWTO *Business Council*, mengingat pariwisata merupakan bisnis yang sangat kompleks dan memerlukan peran serta swasta dan masyarakat untuk menjamin keberhasilannya. Indonesia perlu untuk mengkaji dan menindaklanjuti program ekoturisme atau pariwisata hijau yang dikembangkan oleh UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*). Program ini sejalan dengan ide pembangunan berkelanjutan, dimana kelestarian obyek wisata alam harus dijaga, terutama mengingat fungsinya sebagai pemelihara keseimbangan alam.

Dalam skripsi ini, peneliti memperoleh referensi dari berbagai karya tulis, untuk dapat diperoleh persamaan serta perbedaannya. Salah satu karya tulis yang berjudul "Peran *United Nationas World Tourism Organization* (UNWTO) dalam Program Pemberantasan Eksploitasi Seksual Anak dalam Industri Pariwisata di Brazil Tahun 2006-2012. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai peran UNWTO melalui komite etika untuk menanggulangi masalah Pariwisata Seks Anak di Brazil. Skripsi tersebut menjelaskan peran yang diambil oleh UNWTO sebagai organisasi antar pemerintah yang menangani isu-isu yang menyangkut tentang pariwisata dunia. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah eksploitasi pada anak-anak. Industri pariwisata di Brazil disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban dalam pariwisata seks. Penelitian ini menjelaskan bagaimana UNWTO menjalankan perannya sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi masalah eksploitasi anak di industri pariwisata di brazil dengan berjalan beberapa program kerjasama dengan Brazil, juga dengan LSM lokal yang ikut mengkhawatirkan tentang masalah seksual dan eksploitasi anak dalam pariwisata. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas soal kerjasama antar sebuah Negara dengan Organisasi Internasional, perbedaannya adalah dalam bidangnya, skripsi peneliti lebih membahas mengenai kerjasama UNWTO dengan Indonesia dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM di Pangandaran, sedangankan skripsi ini membahas mengenai peran *United Nationas World Tourism Organization* (UNWTO) dalam program pemberantasan eksploitasi seksual anak dalam industri pariwisata di Brazil.

Karya tulis yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian, dalam kaitannya (STREAM), yang di publikasi oleh *Institute for Essential Services Reform* (IESR), yang merupakan sejumlah aktivis organisasi non-pemerintah (ornop) atas program penyesuaian *structural*, yang membahas mengenai STREAM dan juga ikut berkontribusi dalam program STREAM, menurut IESR Sektor pariwisata memiliki kontribusi untuk memperparah dampak dari perubahan iklim yang mungkin terjadi, namun pada saat yang bersamaan, pariwisata juga memiliki kontribusi untuk memperlambat dan mengurangi dampak tersebut. STREAM yang merupakan proyek kolaborasi antara UN *World Tourism Organization* (UNWTO), INDECON, IESR, dan *Adelphi* yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, telah berjalan semenjak tahun 2011. STREAM merupakan model inovatif dari tindakan-tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dengan mengadopsi pendekatan efisiensi energi dan pada saat yang bersamaan menguatkan struktur lokal untuk keberlanjutan Pangandaran, yang merupakan salah satu tujuan pariwisata di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam program STREAM, IESR memegang tanggung jawab untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan mitigasi. IESR telah melakukan audit energi di hotel-hotel dan restoran (November 2012) di Pangandaran dan Batu Karas, untuk mengukur potensi penghematan energi serta tindakan-tindakan yang mungkin untuk dilakukan, serta mengidentifikasi tindakan-tindakan konservasi energi. IESR bekerja sama dengan pihak pengelola hotel, meningkatkan kapasitas mereka di sisi sistem pengelolaan energi dan perubahan iklim, meningkatkan kesadaran mereka, juga meningkatkan kapasitas dari pemerintah setempat, Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia, juga kelompok-kelompok lokal, mengenai efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim. Program ini juga melibatkan pemerintah lokal dan kabupaten untuk mengembangkan perencanaan pembangunan rendah karbon. IESR juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan di wilayah Pangandaran serta implementasi dari teknologi-teknologi keberlanjutan energi. IESR melakukannya

dengan cara survey lapangan untuk melihat potensi energi terbarukan dan pilihan-pilihan untuk penerapanan teknologi energi terbarukan di tingkat komunitas.

Karya tulis yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian, yaitu dalam kaitannya pariwisata hijau, dalam penelitian yang diteliti oleh Luh Putu Emi Yudhiantari mengenai Ekowisata sebagai alternatif dalampengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Desa Wongaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Penelitian ini bertujuanmengkaji potensi kepariwisataan yang ada di Desa Wongaya Gede dalamrangka pengembangan pariwisata, mengkaji persepsi masyarakat dan wisatawan mancanegara terhadap pengembangan pariwisata di Desa Wongaya Gede, dan merumuskan model pengembangan pariwisata yang dapat dikembangkan di Desa wongaya Gede dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Desa Wongaya Gede memiliki potensi ekologis dan sosial budaya yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dalam menunjang pengembangan kepariwisataan. Berdasarkan persepsi masyarakat diketahui bahwa seluruh masyarakat setuju terhadap pengembangan pariwisata di Desa Wongaya Gede dan hampir seluruh wisatawan yang diwawancarai mengatakan bahwa pariwisata di Desa Wongaya Gede bias dikembangkan. Berdasarkan pendekatan *theseven steps of planning*, maka model pariwisata yang dapat dikembangkan di Desa Wongaya Gede sebagai alternatif dari pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah menerapkan model ekowisata dengan menjual alam sebagai objek (atraksi) dengan berbasiskan pada masyarakat.

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran"

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain:

1. Pengantar Hubungan Internasional, mata kuliah ini membantu dalam memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan internasional serta berbagai bentuk kerjasama internasional.

2. Organisasi Internasional merupakan fokus kajian peneliti menyangkut keterlibatan Organisasi Internasional, didalam matakuliah ini peneliti mempelajari mengenai peran aktor yangterlibat dalam interaksi antar Negara yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global.

3. *Environmental Issues* merupakan fokus kajian peneliti menyangkut tentang masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan hidup dan pengaruhnya terhadap global.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana kondisi Pariwisata di Pangandaran sebelum adanya Kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran?

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran?

3. Kendala apa yang dihadapi oleh Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran?

4. Apa hasil dari kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran?

Peneliti membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada kerjasama *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dan Indonesia dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program

STREAM di Pangandaran. Masa waktu yang telah dipilih mulai tahun 2011 yaitu awal program *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) dilaksanakan selama 3 tahun hingga 2013 di Pangandaran. Hal yang mendasari program STREAM dilaksanakan karena pada mulanya Indonesia dan Jerman dalam sejarahnya telah lama memiliki jalinan kerjasama dalam bidang pariwisata. Pemerintah Federal Jerman melalui UNWTO (*United Nations World Tourism Organizaton*) pernah membantu Indonesia, merevitalisasi Pangandaran, pasca Tsunami pada tahun 2006 dan dilanjutkan dari tahun 2008 hingga 2010. Kerjasama dilanjutkan Indonesia dengan UNWTO melalui STREAM (*Sustainable Tourism Development through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) tahun 2011 – 2013. Program STREAM diaktulisasikan pada penyusunan dokumen pariwisata berkelanjutan (*Tourism Management Plan*) yang disusun berdasarkan partisipasif dan representasi masyarakat lokal (*Local Working Group*).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi Pariwisata di Pangandaran sebelum adanya kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM).

2. Untuk mengtahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran.

3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran.

4. Untuk mengetahui hasil dari kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai kerjasama internasional di dalam Hubungan Internasional, berbagai macam masalah yang terjadi di Negara berkembang. Menguji konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional, menjelaskan berbagai fenomena terkait upaya pengembangan pariwisata hijau dan kerjasama suatu Negara dengan Organisasi Internasional.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.

2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum**.**

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas Negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan Negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-Negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-Negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2005:3).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara Negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita dan Yani, 2005:7).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti (1988), yaitu:

"Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008: 21).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di Negaranya sendiri. Menurut Muhadi Sugiono, dalam bukunya "*Global Governance* Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional" ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing Negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari Negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:33-34).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005:33-34).

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional, adalah:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

2.1.2.1 Kerjasama Multilateral

Kerjasama Multilateral atau Multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Sebagian besar organisasi internasional, seperti dengan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), bersifat multilateral. Pendukung utama multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah seperti Kanada dan negara-negara Nordik. Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral, sedangkan negara-negara kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap dalam urusan internasional, selain berpartisipasi di PBB, misalnya dengan mengkonsolidasikan suara mereka dengan negara-negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di PBB. Kerjasama Multilateral sering disebut sebagai *law making treaties* karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat "terbuka". Kerjasama Multilateral tidak saja mengatur kepentingan Negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan Negara lain yang tidak turut (bukan peserta) dalam kerjasama multilateral tersebut. Kerjasama Multilateral adalah kerja sama yang diadakan oleh lebih dari dua Negara dan sering disebut sebagai *law making treaties* karena mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

2.1.3 Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Teuku May Rudy menjelaskan bahwa ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi: organisasi internasional antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*/IGO) dan organisasi internasional Non-pemerintah (*Non-Governmental Organization*/NGO).

2. Ruang Lingkup (wilayah) Kegiatan dan Keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.

3. Bidang Kegiatan (operasional) Organisasi: bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.

4. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.

5. Ruang Lingkup (wilayah) dan Bidang Kegiatan: global-umum dan global-khusus, regional-umum dan regional-khusus.

6. Menurut Taraf Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*) (Rudy, 2009:94-97).

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional dalam bukunya "Administrasi dan Organisasi Internasional" sebagai berikut:

"Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda"(Rudy, 2009:3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas Negara.

2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.

3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.

4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009:3).

Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu organisasi internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui kebijakan nasionalnya. Bahkan saat ini organisasi internasional dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung, dimana kehadiran mereka (baca: organisasi internasional) mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat dunia untuk bekerjasama dalam menangani suatu permasalahan.

2.2.4 Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang kajiannya bersifat dinamis, kian berkembang seiring berjalannya waktu. Berawal dari hanya membahas keamanan dan perdamaian dunia, semakin lama kajian Ilmu Hubungan Internasional pun semakin kaya dengan kehadiran isu-isu baru. Tepatnya pada tahun 1970an, *Green Perspective* yang membahas mengenai isu lingkungan hidup mulai muncul sebagai kekuatan politik di banyak negara (Paterson, 2001: 235).

Seperti yang disebutkan oleh Jakson dan Sorensen (2009) serta Jill Steans, et al. (2005), kemunculan *Green Perspective* pun ditandai dengan kehadiran 144 negara pada Konferensi PBB yang membahas tentang Linkungan Hidup Manusia atau *United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHE) di Stockholm pada tahun 1972 sebagai pertemuan tingkat global pertama dalam sejarah dunia. Masyarakat dunia mulai sadar akan pentingnya lingkungan hidup. Itulah mengapa kemudian lingkungan hidup menjadi isu area utama ketiga setelah keamanan internasional dan ekonomi global dalam Hubungan Internasional (Porter & Brown, 1996:1 dalam Jackson & Sorensen, 2009: 324).

Sama seperti perspektif-perspektif lainnya, *Green Perspective* sebagai suatu pandangan baru dalam Hubungan Interasional memiliki tiga asumsi sebagai dasar dari argumen-argumen yang dilontarkan oleh para pemikirnya (Steans, et al., 2005: 217).

1. Pertama, *Green Perspective* menenkankan global di atas internasional. Bagi mereka, komunitas global serta hak-hak masyarakat global perlu diakui guna mengontrol sumber daya yang ada.

2. Kedua, menurut pemikir *Green Perspective*, praktek manusia saat ini dalam beberapa cara dapat dikatakan tidak sinkron atau tidak sesuai dengan dunia non-manusia.

3. Ketiga, di mata *Green Perspective* praktek-praktek modern yang didukung oleh sistem filosofis antroposentrisme telah kritis dalam menyebabkan krisis lingkungan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dobson (1990) dengan argumennya yang dikenal dengan sebutan "*limits to growth*" tentang krisis lingkungan (Paterson, 2001: 237).

Dapat dikatakan bahwa sejatinya *Green Perspective* masih memiliki kesamaan titik fokus dengan tiga perspektif tradisional Hubungan Internasional - Realisme, Liberalisme, dan Marxisme dalam hal *human being* atau *antroposentrisme*.

Para pemikir dari *Green Perspective* berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara lingkungan dengan pembangunan. Dalam pelaksanaan suatu pembangunan, harus memperhatikan dampak bagi lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Jika ingin memiliki lingkungan yang baik, maka kegiatan pembangungan harus diminimalisir. Jika ingin memiliki pembangunan yang pesat, maka potensi krisis lingkungan pun juga tinggi (Steans, et al., 2005).

Tidak hanya itu, *Green Perspective* juga berargumen mengenai produksi massal yang dilakukan oleh industri. Menurut mereka, kegiatan produksi tersebut dapat mengancam jumlah sumber daya material maupun energi yang terhitung langka. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat rupanya juga tidak luput dibahas oleh *Green Prespective*. Dengan bertambahnya angka kelahiran, untuk kesekian kalinya potensi terjadinya krisis lingkungan pun turut meningkat. Selain itu, penganut *Green Perspective* juga melihat bahwa aktivitas sosial dan ekonomi manusia saat ini berlangsung dengan cara yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup (Jackson & Sorensen, 2009: 323).

Sesuai dengan yang disebutkan oleh Jackson dan Sorensen (2009: 327), kontribusi Green Prespective dalam Hubungan Internasioal dapat dilihat dengan adanya beberapa kerjasama internasional yang terjalin antara negara-negara yang ada di dunia dengan adanya permasalahan lingkungan hidup. Salah satu contoh rezim yang berhasil adalah rezim ozon. Pembentukan rezim ozon tersebut mulai dibentuk pada tahun 1970an, tepatnya 1974 ketika dua ilmuwan berkebangsaan Amerika memperdebatkan tentang bahaya CFC yang dapat menyebabkan lapisan ozon menipis bahkan berlubang. Rezim tersebut berisi tentang persetujuan untuk memotong bahkan menghentikan produksi CFC (Greene, 2001: 402).

Masih sama dengan perspektif-perspektif yang lain, *Green Perspective* pun bukanlah cara pandang yang sempurna dalam Hubungan Internasional. *Green Perspective* mendapatkan kritik mengenai argumennya mengenai hubungan manusia dengan dunia non-manusia. Pasalnya, untuk menciptakan hubungan yang sinkron antara keduanya membutuhkan perubahan besar dalam semua aspek perilaku sosial dan politik yang ada selama ini. Selain sulit, perubahan tersebut mustahil untuk dilakukan karena tatanan sistem dunia yang ada selama ini otomatis akan berubah pula. Selain itu, *Green Perspective* juga mendapatkan kritik atas argumen mereka yang mengatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan politik global yang tentu saja bertentangan asumsi mereka yang menolak antroposentrisme. Hal ini dikarenakan sejatinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, politik global masih mengutamakan kepentingan manusia atau human interest yang merupakan bagian dari antroposentrisme (Steans, et al., 2005: 229).

Isu lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon, maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional (Rudy, 2009:58).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (http://jdih.menlh.go.id/pdf Diakses pada 2 Maret 2015).

Sedangkan pengertian lain secara ekologis (secara umum ekologi diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya), manusia adalah bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004:10).

2.2.4.1 Sejarah Perkembangan Isu Lingkungan

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1970-an, hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang lebih dikenal dengan *Stockholm Conference*. Sejak tahun ini isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting di forum regional dan multilateral hal ini dikukuhkan dengan diadakannya beberapa pelaksanaan konferensi internasional antara lain:

1. Mengenai "*Human Environment*" di Stocholen Swedia.

2. Konferensi kedua dalam sidang majelis umum PBB ke-27 membentuk *Governing Council United Nations Environment Program* (GC-UNEP) yang memberi mandat antara lain: Mendorong kerjasama internasional di lingkungan hidup, menerbitkan laporan mengenai kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan dampak kebijakan dalam lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di negara berkembang.

Setelah itu tahun 1982 disahkan *World Chapter for Nature* dan Deklarasi Nairobi yang isinya menekankan kembali keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan urgensinya penanganan masalah ini melalui kerjasama global. Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi di Rio de Jenairo Brazil tahun 1992. Yang menegaskan penilaian masyarakat internasional perlindungan masalah lingkungan hidup menjadi masalah bersama dan pembangunan lingkungan hidup tidak lepas dari pembangunan sosial dan ekonomi.

Konferensi yang diadakan oleh PBB yang diadakan di Stockholm Swedia dengan alasan semakin menurunnya kualitas lingkungan dan semakin meningkatnya konsen masyarakat dunia pada saat itu, dalam hal ini juga didasarkan atas kekhawatiran banyak kalangan pemerhati lingkungan di Eropa. Selain itu pada saat itu juga terbit buku riset kajian *Club of Rome*, yang berjudul *The Limits to Growth*, *Club of Rome* merupakan kelompok *think tank* berpengaruh di Eropa, dalam buku tersebut memaparkan bahwa seiring kemajuan pesat indutri dan pertumbuhan penduduk dunia sumber daya alam di bumi semakin menipis, dimana kemudian hal ini menjadi penyebab negatif yang merusak tata lingkungan global yang jika keadaan seperti ini terus dibiarkan akan berefek buruk dan menciptakan krisis pangan dan krisis sumber daya secara global.

Konferensi lingkungan hidup PBB yang berlangsung di Stockholm tersebut kemudian menghasilkan sebuah resolusi mengenai pembentukan *United Nations Environmental Program* (UNEP), dapat dikatakan bahwa UNEP merupakan awal pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dalam hubungan kerjasama antar negara, yang kemudian melahirkan gagasan dari pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan pertemuan-pertemuan serta

pembahasan yang berkesinambungan, dan diangkat secara global dalam forum dan konferensi internasional. Dalam perkembangannya konferensi-konferensi internasional yang membahas mengenai masalah lingkungan dari tahun ketahun seperti yang tertera diatas, terus diadakan dalam mencari solusi dalam penanggulangan masalah yang dianggap sulit dalam tata lingkungan hidup global saat ini, pertemuan antar negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), dimana hasil dari salah satu pertemuan UNFCCC yang diadakan yaitu mengenai kesepakatan negara-negara pada tahun 1997 untuk membuat konsensus penanganan lingkungan yang dirangkum dalam suatu protokol yang disebut *Protocol Kyoto*, hingga dalam perkembangan berikutnya pertemuan lingkungan yang melibatkan negara-negara masih terus dilakukan dalam lingkup UNFCCC (http://www.theglobal-review.com/ Diakses pada 4 Maret 2015).

2.2.4.2 Pariwisata Berkelanjutan

Sustainable Tourism (Pariwisata Berkelanjutan) adalah pariwista yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi – investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif. Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan *sustainable tourism* sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber – sumber atau asset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan.

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah sebuah konsep turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ada pada laporan *World Commission on Environment and Development*, berjudul *Our Common Future* (atau lebih dikenal dengan *the Brundtland Report*) yang diserahkan ke lembaga PBB pada tahun 1987 (Mowforth dan Munt, 2003 : 58).

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Singkat kata, dengan pembangunan berkelanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya.

Sedangkan pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan.

Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi social ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ekowisata menurut *International Ecotourism Society* adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Munculnya istilah *responsible tourism* atau pariwisata yang bertanggung jawab seakan ingin melengkapi konsep-konsep terdahulu. Definisi pariwisata berkelanjutan menurut sebagian orang agak sulit dipahami maksud dan operasionalisasinya secara langsung, sedangkan definisi ekowisata cenderung mengarah hanya kepada wisata berbasis alam terutama kawasan yang dilindungi seperti taman nasional dan cagar alam. Tujuan yang ingin dicapai oleh *responsible tourism* sesungguhnya sama dengan kedua konsep sebelumnya yaitu pariwisata yang berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Tetapi *responsible tourism* lebih menekankan pilihan yang diambil oleh konsumen dalam menentukan tujuan wisata, akomodasi, model transportasi dan cara melakukan perjalanan, misalnya memilih mengatur sendiri perjalanannya dibandingkan mengikuti kelompok tur *Responsible tourism* juga menekankan kesadaran wisatawan itu sendiri untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari kunjungannya ke suatu tempat (Kurniawati, 2013:29).

2.2.4.2.1 Pariwisata Hijau

Pariwisata Hijau atau *Green Tourism* sebagai salah satu bentuk ekoturisme atau wisata berbasis ekosistem. *Green Tourism* dapat berarti wisata yang menitikberatkan pada kunjungan ke lokasi satwaliar berada (misal taman nasional dan cagar alam). Jadi *Green Tourism* ini bisa jadi diantaranya adalah kegiatan *hiking* (gerak jalan dan mendaki), *trekking*, *birding* atau *birdwatching* (pengamatan burung), *snorkeling*, dan *diving*. Pariwisata Hijau juga dapat diartikan sebagai wisata yang berkelanjutan atau artinya tidak mengakibatkan kerusakan di lokasi wisata dan cagar budaya yang sedang dikunjungi (ramah lingkungan).

Green Tourism yang mengusung idealisme ekoturisme berbasis konservasi sebenarnya bukan merupakan barang baru di dunia serta telah diimplementasikan di Indonesia. *Green Tourism* sebagai bagian *green life style* pun perlu dipupuk sedari

dini sebagai *green mind*. Beberapa *green tourism* yang dapat dipraktekan, antara lain:

1. Lingkungan

Praktek *Green Tourism* dapat dimulai dengan cara menghormati alam lingkungan termasuk diantaranya menjaga jarak, tidak menyentuh apalagi menganiaya satwaliar, juga selalu mengikuti jalur trek yang telah disediakan. Juga telah mendukung usaha konservasi dengan cara membayar tiket masuk taman nasional atau kawasan yang dilindungi. Merupakan salah satu praktek termudah adalah budaya membuang sampah pada tempatnya. Percaya atau tidak wisatawan Indonesia mungkin yang paling susah untuk tertib membuang sampah di manapun mereka berada.

2. Produk Hewani dan Daur Ulang

Tidak membeli kerajinan tangan dan produk yang berasal dari satwaliar yang dilindungi dan terancam punah. Pakailah juga pakaian yang ramah lingkungan (*second hand field clothing, daypack, carrier, boots*). Pola makan pun diubah agar lebih ramah lingkungan seperti menjadi vegetarian, *ovo - lacto* vegetarian atau yang paling keras vegan.

3. Produk dan Budaya Lokal

Memilih hotel atau hostel lokal dan ramah lingkungan, memilih makanan di restoran lokal, serta berbelanja di pasar tradisional. Selain lebih murah dengan membeli produk lokal, haltersebut juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menghormati budaya setempat. Yang terpenting adalah untuk selalu memperhatikan tingkah laku dan perkataan dimanapun berada.

4. Pemandu lokal

Perkaya pengalaman dan mendukung ekonomi lokal dengan menyewa pemandu lokal. Pemandu berlisensi yang telah direkomendasikan operator tur wisata.

5. Transportasi

Usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi penerbangan lokal. Ubah pola transportasi menjadi sepeda, kereta api, bis atau kapal feri. Tinggal di lokasi wisata untuk jangka waktu yang lama dibanding berpergian jangka pendek.

6. Aksi Konservasi

Berkontribusi dan ikut berpartisipasi dalam suatu proyek atau program konservasi dapat berdampak positif pada kehidupan masyarakat lokal. Menjadi turis sekaligus *volunteer* dari suatu kegiatan ilmiah berbasis konservasi atau perlindungan alam. Selain dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman hidup juga dapat meningkatkan taraf hidup komunitas lokal.

Enam poin *Green Tourism* yang tercantum sebelumnya merupakan hasil adaptasi prinsip – prinsip ekoturisme *The International Ecotourism Society (TIES)*. *Green Tourism* seperti halnya *Ecotravel, Ecovacation, Eco - (ad)venture, Eco - cruise, Eco - safari, Nature tourism* (wisata alam), *Low impact tourism, Bio - tourism, Ecologically responsible tourism* memang biasa digunakan dalam istilah bisnis pariwisata berbasis ekosistem. Ekoturisme, apresiasi terhadap alam berbentuk produk pariwisata, tidak hanya mengandalkan alasan ekonomi semata tapi tidak berkelanjutan secara ekologis. Apalagi saat ini ekoturisme hanyalah dipandang sebagai suatu bentuk oportunistik atas ekosistem.

Green Tourism dapat lebih bermakna dibanding hanya *taking only pictures and leaving only footprints*. Model wisata ini dapat membuat perbedaan yang lebih berarti bagi pribadi dan dampak berkelanjutan bagi komunitas lokal yang terlibat langsung di dalamnya. Selain itu pula meminimalisir perusakan terhadap alam, mendukung perlindungan suatu kawasan, mengedepankan pemberdayaan komunitas lokal, mengapresiasi lebih kebudayaan dan nilai lokal, serta berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi alam dan lingkungan sekitarnya (*Special Report, The U.S. Ecotourism Market, WTO, 2002*). Dengan kata lain praktek *Green Tourism* berarti keberlanjutan akan lingkungan, kebudayaan, dan juga komunitas pada lokasi wisata yang dikunjungi (http://www.academia.edu/8018953/ Ekologi_Pariwisata Diakses pada 6 Maret 2015).

Dalam mengembangkan pariwisata hijau, terdapat beberapa peluang, diantaranya:

1. Meningkatnya permintaan pasar internasional dan nasional pada produk (paket tur maupun akomodasi) yang ramah lingkungan.

2. Perkembangan ekonomi Indonesia relatif stabil dan meningkat.

3. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia dan wisatawan domestik yang berlibur di Indonesia.

4. Meningkatnya jumlah perusahaan penerbangan yang melayani rute ke kawasan-kawasan yang memiliki daya tarik wisata.

5. Meningkatnya jumlah penerbangan berbiaya murah, sehingga meninngkatkan animo berwisata karena keterjangkauan biaya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan tinjauan pustaka dan teori-teori yang peneliti gunakan dalam peneitian ini, kaitannya dengan penelitian sesuai dengan teori hubungan internasional

bahwa pada perkembangannya, kerjasama internasional kini tidak hanya dilakukan oleh Negara dengan Negara saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh negara dengan aktor non negara seperti organisasi internasional, individu dan organisasi non-pemerintah, dan aktor-aktor tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan dalam melaksanakan kerjasama internasional. Seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bekerjasama dengan Negara-negara anggotanya melalui *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) untuk membantu mengembangkan pariwisata di Indonesia melalui pariwisata hijau.

Secara kategori Kerjasama Internasional, kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO termasuk kedalam Kerjasama Multilateral. Indonesia termasuk anggota UNWTO yang memiliki tujuan pokok untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, yang diyakini merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah, serta mempromosikan perdamaian dan saling pengertian antar-negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu contoh kerja sama antara Indonesia dengan UNWTO dalam bidang pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah program "*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran*" yang dimaksudkan untuk menjadi model langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya.

Berdasarkan penggolongan Organisasi Internasional dalam hal kegiatan administrasi, maka *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) termasuk kedalam *Intergovernmental Organization* (IGO) atau organisasi antar pemerintah yang mempunyai tujuan khsusus pada suatu bidang tertentu dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh Negara, dalam artian tidak terbatas pada sekelompok Negara tertentu. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) adalah badan dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang tidak membatasi jumlah anggotanya dan mempunyai tujuan khusus dalam menangani pariwisata dunia. Pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional suatu negara akan membawa anggota-anggota dalam UNWTO untuk berperan agar pariwisata di negara-negara berkembang menjadi lebih maju. Salah satu contoh adalah kerjasama Indonesia dengan UNWTO, dengan menjalin kerjasama melalui program pariwisata berkelanjutan melalui energi efisiensi dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi (STREAM - *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) di Pangandaran.

Dalam hal *green tourism*, kerjasama Indonesia dan UNWTO melaksakan praktek-praktek pariwisata hijau dengan melaksanakan aspek lingkungan dan aksi konservasi, antara lain: Mitigasi dimana dilaksanakan reduksi emisi karbon di industri hotel dan pengembangan energi terbarukan untuk fasilitas pariwisata. Dan Adaptasi dimana dilakukan penanaman mangrove dan terumbu karang, peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak dariperubahan iklim, dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan tanggap perubahan iklim. Dalam hal penanaman mangrove, kegiatan tersebut memiliki andil dalam upaya adaptasi dan mitigasi iklim melalui penyerapan emisi CO2 yang diantaranya gas rumah kaca, dan terumbu karang merupakan organisme simbion yang dapat berperan sebagai penyerapan karbon di atmosfir, dan menurut para ahli terumbu karang di dunia berpotensi menurunkan jumlah karbon. Hal ini dilalukan untuk menanggulangi perubahan iklim dan upaya dalam melaksanakan pariwisata hijau sesuai dengan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan *United Nations World Tourism Ogranization* **(UNWTO) melalui program STREAM.**

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan UNWTO (*United Nations World Tourism Organizaton*) yang diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

3.2 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang peneliti jadikan sebagai informan adalah sebagai berikut :

1. *Asst Deputy Director for* UNWTO *Ministry of Tourism The Republic of* Indonesia (staff perwakilan UNWTO di Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Peneliti berniat untuk

mewawancara seputar kinerja Pemerintah dan *United Nations World Tourism Organizaton* (UNWTO) secara umum, dan pelaksanaan Pariwisata Hijau melalui program *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran* (STREAM) di Pangandaran.

2. Staff Dinas Pariwisata Pangandaran. Peneliti berniat untuk mewawancara seputar kondisi Pariwisata sebelum adanya Kerjasama Indonesia - UNWTO dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui program STREAM di pangandaran, kendala apa saja yang dihadapi, juga hasil yang telah dicapai.

3. Staff INDECON. Peneliti berniat untuk mewawancara seputar kinerja dari Mitra Utama pada program STREAM di Pangandaran.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sistem, yang didukung oleh teknik pengumpulan data: Studi Kepustakaan, Penelusuran Data Online, Dokumentasi, dan Wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada kerjasama suatu Negara dan Organisasi Internasional dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau di Pangandaran, dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

3.3.1 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. Diharapkan dengan teknik studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan data sekunder.

3.3.1.1 Penelusuran Data Online

Penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

3.3.1.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, *brochure* dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.

3.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan peneliti adalah wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Diharapkan dengan teknik wawancara peneliti dapat mengumpulkan data primer.

3.4 Uji Keabsahan Data

Data yang diperoleh peneliti melalui uji keabsahan data berupa membandingkan data yang diperoleh dari media elektronik serta konfirmasi studi lapangan (pangandaran) kelembaga yang terkait. Salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengkonfirmasi kebenaran data yang diperoleh melalui media elektronik. Peneliti juga melakukan prapenelitian dengan melakukan wawancara singkat ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bagian *Asst. Deputy Director for UNWTO Ministry of Tourism The Republic of Indonesia*, pada 9 april 2015. Untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh melalui penelurusan data online tersebut.

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian Data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan Kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari informan yakni Perwakilan *United Nations World Tourism Organizaton* (UNWTO) untuk Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat, diantaranya:

1. Kantor *Ministry of Tourism and Creative Economy*. Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta.

2. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ciamis. JL. Mr. Iwa Kusumasumantri, No. 14, Ciamis.

3. Kantor *Indonesia Ecoturism Network* (INDECON). Jl.Tebet Timur Raya No. 22 D, Jakarta.

4. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No.112-114, Bandung.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Pariwisata di Indonesia

United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mendefinisikan pariwisata sebagai:

"*The activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one concecutive years for leisure, business, and other purposes*" (Muljadi, 2009:9).

Pariwisata menyangkut perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain atau disebut dengan istilah "*tour*". Seperti kutipan dari batasan yang diberikan oleh WATA *(World Association of Travel Agent)* adalah merupakan perlawatan keliling yang memakan waktu lebih daritiga hari yang diselenggarakan oleh biro perjalanan wisata (BPW) dengan acara antara lain peninjauan di beberapa kota atau objek wisata dalam maupun di luar negeri. Jika ditinjau dari segi etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas dua suku kata yaitu "pari" yang berarti banyak atau berulang, dan kata "wisata" yang berarti perjalanan atau bepergian. Dapat diambil pengertian bahwa kata pariwisata berarti suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berulang dari suatu tempat ke tempat lain.

Negara-negara di dunia cenderung menyelenggarakan pariwisata karena industri pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Seperti yang telah diakui oleh beberapa organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia, *United Nation*s *World Tourism Organization* (UNWTO), dan *World Tourism and Trade Center* (WTTC). Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Sektor ini telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian abad 21 bersama dengan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Perkembangan industri pariwisata yang sangat dinamis dan terus diperkuat oleh kemajuan tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia, mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia

Keberadaan pariwisata dalam suatu daerah bisa dikatakan merupakan suatu gejala yang kompleks di dalam masyarakat. Di sini terdapat suatu keterkaitan antara daerah objek wisata yang memiliki daya tarik masyarakat/penduduk setempat dan wisatawan itu sendiri. Sejak dahulu kegiatan pariwisata sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, hanya saja belum menjadi kalimat yang populer di telinga masyarakat. Di Indonesia sendiri kata pariwisata mulai masyarakat pada tahun 1958 setelah diadakannya Musyawarah Nasional Tourisme II di Tretes (Jawa Timur) pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 1958 (http://www.kompasiana.com/inthand/konsep-perubahan-sosial-budaya-dalam-masyarakat_552a86e76ea8346218552d34 Diakses pada 23 Juni 2015).

Banyak negara, bergantung banyak pada industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Industri pariwisata dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat besar baik bagi negara, bagi wilayah setempat yang bersangkutan, maupun bagi negara asal dari para wisatawan yang datang berkunjung. Hal itu sejalan dengan tujuan dari didirikannya sebuah negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan bahwa tujuan dari didirikannya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas dasar hal itu pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan tujuan dari negaranya tersebut, tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya didukung oleh partisipasi dari rakyat yaitu dari masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat Indonesia itu di antaranya adalah dengan cara setiap daerah atau wilayah memajukan sektor pariwisata di daerahnya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menarik para wisatawan yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk berkunjung dan berwisata ke daerahnya. Dengan demikian hal itu dapat menjadikan pendapatan perekonomian dari wilayah tersebut dapat meningkat dan sejalan dengan meningkatnya perekonomian di masing-masing wilayah Indonesia maka secara otomatis meningkat pula

perekonomian di negara Indonesia sehingga salah satu tujuan dari didirikannya negara Indonesia dapat tercapai.

Dalam era globalisasi, sektor pariwisata saat ini telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia, dan pariwisata merupakan penyumbang terbesar dalam pemasokan pendapatan terutama dalam hal perekonomian masyarakat dan negara. Kegiatan pariwisata sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat yang ada di kota sampai pada masyarakat yang ada di desa. Pada masyarakat, terutama yang peduli akan kemajuan ekonomi di desanya atau yang ingin meningkatkan perekonomian di keluarganya ataupun perekonomian pada dirinya sendiri mulai menyadari akan pentingnya peranan dari pariwisata untuk mendongkrak peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Kegiatan pariwisata dilakukan oleh masyarakat tersebut untuk mendorong kemajuan perekonomian masyarakat setempat dan tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan perekonomian dalam suatu negara juga ikut berpengaruh karena kemajuan perekonomian dari masing-masing daerahnya dan beban yang ditanggung oleh negara pun ikut berkurang karena masing-masing dari daerahnya ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi daerah mereka. Hal ini membuktikan bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi dari suatu masyarakat ataupun dari suatu negara sangatlah besar.

Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut. Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia.

Pada tahun 2010, terdapat 7 lokasi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia. Objek Wisata tersenut diantaranya adalah, Pulau Komodo, Tangkuban Perahu, Pantai Pangandaran, Bunaken, Pantai Senggigi, Borobudur, Danau Toba, Kuta Bali, dan lain-lain. Sementara itu, empat wakil lain juga ditetapkan UNESCO dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia yaitu wayang, keris, batik dan angklung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebelas provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat. Sekitar 59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis. Singapura dan Malaysia adalah dua negara dengan catatan jumlah wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah ASEAN. Sementara dari kawasan Asia (tidak termasuk ASEAN) wisatawan Jepang berada di urutan pertama disusul RRC, Korea Selatan, Taiwan dan India. Jumlah pendatang terbanyak dari kawasan Eropa berasal dari negara Britania Raya disusul oleh Perancis, Belanda dan Jerman. Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional, urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, yang sekarang menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (http://alamendah.org/2010/06/24/daftar-situs-warisan-dunia-di-indonesia/ diakses pada 18 Januari 2016).

Mengamati perkembangan dunia pariwisata di Indonesia yang mengalami berbagai goncangan baik secara politik, ekonomi, dan keamanan tidak membuat sector ini menjadi patah arang. Jika kita kembali ke belakang pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup mengoyahkan berbagai sektor terutama sektor industri. Ditambah dengan situasi politik dan keamanan yang memanas karena terjadinya penggulingan kekuasaan Orde Baru, berturut-turut dari tragedy WTC, Bom Bali I dan Bom Bali 2 menyebabkan banyak Negara-negara terutama Negara Eropa yang melarang warga negaranya mengunjungi Indonesia dengan adanya *travel warnin*g, suhu politik yang semakin menjadi-jadi dengan banyaknya kerusuhan antar etnis, kericuhan Pilkada di Beberapa daerah yang di *expose* oleh siaran pemberitaan luar negeri yang memberikan citra buruk bagi Indonesia. Dilarangnya Maskapai penerbangan Indonesia untuk masuk ke beberapa Negara di Asia dan Eropa menambah daftar panjang citra buruk Indonesia.

Menyikapi hal itu, pemerintah dibantu oleh pihak swasta tidak tinggal diam, berbagai program untuk mengembalikan citra Indonesia dibuat dan digalakkan dengan biaya yang tidak sedikit, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengundang media dari luar negeri untuk meliput perkembangan situasi di Indonesia cukup membuahkan hasil, beberapa Negara sudah menghilangkan travel warning ke Indonesia. Tahun 2006 situasi politik dan keamanan di Indonesia dirasakan membaik begitupun dengan tingkat

kunjungan wisatawan asing yan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Tahun 2007 Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah untuk *Konferensi Global Warming* yang diadakan di Bali, dihadiri oleh lebih dari 10.000 peserta dari berbagai Negara dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada gangguan keamanan dan lain sebaginya, bahkan banyak diantara peserta konferensi yang sengaja memperpanjang waktu tinggal mereka di Bali untuk merasakan keindahan Bali sebagai The best Island in the World. Hal tersebut dijadikan moment yang bagus oleh pemerintah dengan prediksi 10.000 orang yang hadir akan berbicara di Negara nya bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi.

Untuk itu di tahun 2008, kementrian Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh 17 departemen dan *stake holder* dari para pelaku usaha mencanangkan suatu program yang penuh dengan optimisme dan persiapan yang sangat matang dengan menggelar hajatan bertajuk "Visit Indonesia Year 2008" atau tahun kunjungan wisata Indonesia 2008 dengan target 7 juta wisatawan akan datang ke Indonesia pada tahun 2008 dengan revenue USD 8,9 Milyar di Tahun 2008. Target tersebut bukanlah target yang mudah untuk dilaksanakan tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan program ini. Jika diibaratkan, Pariwisata di Indonesia ini adalah bagaikan sebuah roda yang besar dan berkarat, perlu diolesi minyak, dan didorong sedikit demi sedikit agar roda itu tidak patah dan dapat berputar kembali. Manusia adalah aspek yang paling penting dalam hal ini. Untuk itu sebagai langkah awal kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sadar wisata dan menerapkan SAPTA PESONA dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan manusia yang sadar wisata sehingga tercipta keramahan yang tulus dari hati dan bisa membawa kenangan yang baik bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke Indonesia (http://www.kemlu.go.id/ diakses pada 18 Januari 2016).

Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebelas provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat. Sekitar 59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis. Singapura dan Malaysia adalah dua negara dengan catatan jumlah wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah ASEAN. Sementara dari kawasan Asia (tidak termasuk ASEAN) wisatawan Jepang berada di urutan pertama disusul RRC, Korea Selatan, Taiwan dan India. Jumlah pendatang terbanyak dari kawasan Eropa berasal dari negara Britania Raya disusul oleh Perancis, Belanda dan Jerman (http://www.aptjakarta.ac.id/html/index.php ?id=artikel&kode=25 diakses pada 18 Januari 2016).

Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional, urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia yang sekrang berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Perkembangan pariwisata Indonesia sebagai komponen pembangunan memperlihatkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari indikator arus masuk wisatawan mancanegara di Indonesia maupun penghasilan yang diterima, yakni sebesar US $7.8 milyar pada tahun 1997, demikian juga jumlah wisatawan mancanegara sebesar 5,7 juta orang. Ada harapan jumlah ini meningkat di tahun mendatang (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Kepariwisataan - P3 Par).

4.1.1.1.1 Undang-undang Pariwisata di Indonesia

Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, menimbang:

1. Bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tuhan 1945,

2. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia,

3. bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional,

4. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global,

Menurut undang – undang pemerintah nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pengertian wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan wisata atau Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata.

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Tujuan Kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan juga sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jadi diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa (UU Nomor 10 Tahun 2009 (UU Nomor 10 Tahun 2009).

4.1.1.1.2 Pariwisata Hijau di Indonesia

Istilah *Responsible Tourism, Sustainable Tourism, Eco-tourism, Green Tourism* sebetulnya memiliki makna serupa yaitu sama-sama mengusung ramah lingkungan dalam kegiatan pariwisatanya. Pariwisata ramah lingkungan yang memelihara bukan merusak. Di zaman dimana kepedulian dan bukti ilmiah tumbuh setiap hari tentang pemanasan global dan efek umumnya merugikan umat manusia. Pariwisata ini menandakan bahwa orang yang akan melakukan bisnis dengan menjalankan bisnis mereka dengan cara berusaha untuk mengurangi hal-hal yang berdampak buruk pada lingkungan.

Menurut PBB, jumlah wisatawan selalu meningkat, membuat Pariwisata Hijau tidak hanya disukai tetapi juga menjadi kebutuhan. Banyak daerah yang tergantung pada pendapatan dari pariwisata untuk mendukung ekonomi lokal. Pariwisata hijau dianggap menawaran hal yang terbaik untuk melindungi ekologi daerah yang tentunya berdampak pada wilayah lain. Pariwisata hijau tidak berarti liburan dengan menghabiskan waktu seadanya dengan sedikit atau tanpa kenyamanan. Sebaliknya, banyak orang percaya bahwa hal itu dapat menjadi pengalaman yang mengagumkan.

Pariwisata Hijau juga dapat mempelajari flora lokal, fauna dan warisan budaya daerah, serta belajar cara-cara untuk melindungi dan melestarikannya. Ada juga perjalanan wisata yang kegiatannya untuk melestarikan habitat lokal. Liburan dalam Pariwisata Hijau bukan hanya sekedar melakukan kegiatan wisata yang biasa saja, namun dalam Pariwisata Hijau banyak orang melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mempelajari segala hal agar wisatawan lebih peduli terhadap lingkungan.

Pariwisata Hijau atau *Green Tourism* sebagai sebagai salah satu bentuk ekoturisme atau wisata berbasis ekosistem adalah salah satu bagian dari Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*). Istilah *Green Tourisme* merupakan hasil adaptasi dari definisi dan prinsip-prinsip ekowisata yang ditetapkan oleh TIES (*The International Ecotourism Society*) pada tahun 1990. Dimana ekowisata memiliki pengertian, perjalanan (wisata) yang bertanggungjawab ke daerah alam dengan tujuan melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam pengertian yang sederhana, *Green Tourism* adalah perjalanan wisata ke suatu tempat di mana flora, fauna, dan warisan budaya sebagai tujuan utama.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *Green Tourism* memiliki tujuan utama memberikan wawasan dan kepedulian manusia terhadap lingkungan, sehingga mampu meningkatkan apresiasi yang lebih besar terhadap habitat alam. Konsep *Green Tourism* memiliki tujuan untuk mendidik para pelancong, menyediakan dana untuk konservasi ekologis. Sehingga secara langsung bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan politik masyarakat lokal, serta mendorong rasa hormat terhadap budaya yang berbeda dan untuk hak asasi manusia.

Green Tourism merupakan salah satu bentuk ekoturisme atau wisata berbasis ekosistem yang dapat berarti:

1. Wisata yang menitikberatkan pada kunjungan ke lokasi satwaliar berada (misalnya taman nasional dan cagar alam). *Green Tourism* diantaranya adalah kegiatan *hiking* (gerak jalan dan mendaki), *trekking*, *birding* atau *birdwatching* (pengamatan burung), *snorkeling*, dan *diving*.

2. Wisata yang berkelanjutan atau artinya tidak mengakibatkan kerusakan di lokasi wisata dan cagar budaya yang sedang dikunjungi (ramah

lingkungan). Tidak mencemari lingkungan dengan buang sampah sembarangan.

Konsep *Green Tourism* mencakup program-program wisata yang meminimalkan aspek-aspek negatif dari pariwisata konvensional terhadap lingkungan dan meningkatkan integritas budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, selain mengevaluasi budaya dan faktor lingkungan, *Green Tourism* juga merupakan bagian integral dari kegiatan promosi daur ulang, efisiensi energi, konservasi air, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. *Green Tourism* dapat lebih bermakna dibanding hanya *taking only pictures and leaving only footprints*. Sebab model wisata ini dapat membuat perbedaan yang lebih berarti bagi kita pribadi dan dampak berkelanjutan bagi komunitas lokal yang terlibat langsung di dalamnya. Dengan kata lain praktek *Green Tourism* berarti keberlanjutan akan lingkungan, kebudayaan, dan juga komunitas pada lokasi wisata yang kita kunjungi.

Saat ini konsep wisata *Green Tourism* mulai diberlakukan dalam Wisata MICE (*Meeting, Intensive, Conference, Exhibition*). Bahkan UNWTO (*United World Tourism Organization*) sudah mengeluarkan himbauan agar *green tourism* diterapkan dalam wisata MICE di Indonesia, mengingat wisata MICE di tingkat internasional sudah memberlakukan *Green Tourism.*

Penerapan *green tourism* bagi *destination* di setiap negara sudah harus diberlakukan. Jika tidak menerapkan, negara itu bisa dihindari oleh wisatawan mancanegara (wisman) yang melakukan *leasure*. Mengingat, kini isu masalah lingkungan sudah mendunia. Kini *Green Tourism* menjadi isu sentral dunia, seiring santernya isu pemanasan global. Sehingga, wajib diikuti dan dijalankan pemerintah serta pelaku dunia usaha wisata, termasuk wisata MICE pada tahun-tahun mendatang.

Green Tourism yang mengusung idealisme ekoturisme berbasis konservasi sebenarnya bukan merupakan barang baru di dunia serta telah diimplementasikan di Indonesia. Walaupun demikian mungkin masih jarang terdengar rimbanya dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang tahu yang bergelut dengan dunia pariwisata. *Green Tourism* harus menjadi bagian dari *green life style* yang perlu dipupuk sedari dini sebagai *green mind* (https://prezi.com/bdscobeqwyob/green-tourism/ Diakses pada 27 Juni 2015).

Selain *green tourism* di terapkan dalam MICE di Indonesia, *green tourism* juga diterapkan dalam program STREAM di Pangandaran, Indonesia. Secara tidak langsung, Indonesia sudah mulai mengadaptasi *green tourism*, hal ini baik dilakukan mengingat pentingnya setiap orang untuk menjaga lingkungan. Jika seorang wisatawan berkunjung ke tempat wisata yang menerapkan pariwisata hijau, maka bukan tidak mungkin wisatawan tersebut akan menerapkan hal yang serupa di tempat wisata lainnya yang mereka kunjungi. Hal ini sejalan dengan tujuan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*).

Selain itu terdapat tempat-tempat wisata di Indonesia yang sudah mengadopsi *green tourism* (pariwisata hijau) antara lain: Danau Lido, Bogor. Agro Wisata Kaliklatak, Banyuwangi. Pulau Berhala, Sumatra Utara. Sumatra *and beyond*, Sumatra Barat.

4.1.1.2 Gambaran Umum *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)

UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) adalah badan PBB yang bertanggungjawab untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan dapat diakses secara universal. Sebagai organisasi internasional terkemuka di bidang pariwisata, UNWTO mempromosikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang inklusif dan kelestarian lingkungan dan menawarkan kepemimpinan dan dukungan untuk sektor ini dalam memajukan kebijakan pengetahuan danpariwisata di seluruh dunia.

UNWTO mendorong pelaksanaan Kode Etik Pariwisata, untuk memaksimalkan pariwisata dalam kontribusi sosial-ekonomi dan sebisa mungkin meminimalkan dampak negatif, dan berkomitmen untuk mempromosikan pariwisata sebagai instrumen dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Millenium Development Goals* - MDGs), diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan (pariwisata berkelanjutan - *sustainable tourism*) di seluruh dunia.

UNWTO membangkitkan pengetahuan masyarakat, mempromosikan kebijakan dan instrumen pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan pariwisata, dan bekerja untuk menjadikan pariwisata sebagai sarana yang efektif untuk pembangunan melalui program-program bantuan teknis di lebih dari 100 negara di seluruh dunia.

Keanggotaan UNWTO meliputi 157 negara, 6 anggota asosiasi dan lebih 480 anggota afiliasi yang mewakili sektor swasta, lembaga pendidikan, asosiasi pariwisata dan otoritas pariwisata setempat.

4.1.1.2.1 Latar Belakang *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)

Asal mula UNWTO adalah *International Union of Official Tourist Publicity Organization*, yang berdiri pada tahun 1925 dengan markas besar di Den Haag, Belanda. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, nama organisasi diubah menjadi Internation *Union for Official Tourism Organization* (IUOTO), sementara

markas besarnya dipindahkan ke Jenewa, Swiss. IUOTO sendiri adalah sebuah organisasi non pemerintah, yang menghimpun badan-badan kepariwisataan negara-negara. Baru pada tahun 1967, IUOTO mengeluarkan rekomendasi untuk mengubah dirinya menjadi suatu organisasi antar pemerintah. Menindaklanjuti rekomendasi ini, UNWTO didirikan pada tahun 1974, dengan markas besar terletak di Madrid, Spanyol. Dalam sidang *Executive Council* UNWTO di Jordania, bulan Juni 2002 lalu, dicapai kesepakatan untuk menjadikan WTO sebagai specialized agencies (badan khusus) PBB. Sedangkan untuk bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol.

4.1.1.2.2 Tujuan *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)

Tujuan pokok UNWTO adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, kelamin, bahasa dan agama. Dalam mendukung tujuan pokok ini, organisasi memberikan perhatian atas pembangunan negara-negara dalam bidang pariwisata. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, di mana diyakini pentingnya sektor tersebut untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah serta mempromosikan perdamaian dan saling pengertian di antara negara-negara.

4.1.1.2.3 Keanggotaan *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)

A. Keanggotaan UNWTO terdiri dari:

a. *Full Members*

Anggota ini dibuka untuk seluruh anggota- anggota yang berdaulat dan memiliki organisasi pariwisata nasional, dan Negara- Negara lain dapat menjadi anggota jika mereka dicalonkan dan mendapat persetujuan dari majelis umum dengan 2/3 suara yang hadir dan juga harus menerima segala peraturan yang telah ditetapkan oleh majelis umum.

b. *Associate members*

Anggota ini terbuka untuk seluruh wilayah atau kelompok wilayah yang tidak memiliki tangggung jawab terhadap hubungan eksternal dan bagi wilayah yang menjadi anggota dari organisasi pariwisata nasional berhak menjadi anggota asalkan Negara dari wilayah ini mempunyai tanggung jawab akan hubungan eksternal dan menyetujui keanggotaan mereka, serta menyatakan bahwa mereka menerima kewajiban keanggotaan. Ketika Anggota *Associate* dari Organisasi menjadi bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk hubungan eksternal, anggota ini berhak menjadi anggota penuh atau *full members* yang dinyatakan secara tertulis oleh sekertaris jenderal yang mengangkat sebuah undang- undnag dan menerima kewajiban keanggotaan penuh.

c. *Affiliate Members*

Anggota ini terbuka bagi seluruh badan internasional, baik antar pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan kepentingan khusus di bidang pariwisata dan juga badan dan asosiasi yang bersifat komersial. Badan internasional lainnya, baik antar pemerintah dan non- pemerintah, terkait dengan kepentingan khusus di bidang pariwisata, dapat menjadi Anggota affiliasi dengan mengajukan permintaan secara tertulis yang diajukan kepada sekertaris jendal dan dengan persetujuan dari majelis dengan 2 per 3 suara dari anggota penuh/ full members yang hadir pada persidangan. Sama halnya dengan badan internasional yang memiliki kepentingan khusus di bidang pariwisata, badan atau asosiasi yang bersifat komersial juga dapat menjadi anggota ini dengan mengajukan permintaan yang ditujukan kepada sekertaris jendral dan mendapat persetujuan dari sidang majelis dengan 2/3 suara dari anggota penuh yang hadir. Anggota affiliate harus memiliki peraturan sendiri dan menyerahkan peraturan tersebut kepada majelis untuk disetujui dan harus berpartisipasi, baik dalam kegiatan organisasi sendiri maupun kelompok.

B. Susunan UNWTO terdiri dari :

a. Majelis Umum

Majelis umum merupakan badan tertinggi di UNWTO yang terdiri dari delegasi- delegasi yang mewakili anggota penuh/ full members. Pada setiap sidang anggota associate harus menunjuk wakilnya maksimal 5 wakil, dan salah satunya harus ditunjuk menjadi ketua delegasi. Sedangkan anggota affiliate menunjuk 3 pengamat dan setiap anggota affiliate menunjuk satu orang pengamat yang bertugas mengamati pekerjaan majelis umum. Sidang majelis umum ini diadakan setiap 2 tahun sekali dan dapat diadakan dalam keadaaan yang mendesak atas permintaan dewan dan mayoritas suara dari anggota penuh. Majelis juga harus memiliki aturan sendiri, dan tugas- tugas dari majelis yaitu, memilih Presiden dan Wakil-Presiden, memilih anggota Dewan, menunjuk Sekretaris Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Dewan, menyetujui Peraturan Keuangan Organisasi, meletakkan pedoman umum administrasi Organisasi, menyetujui peraturan staf yang berlaku untuk personil Sekretariat, memilih auditor atas rekomendasi Dewan, menyetujui program kerja umum Organisasi, mengawasi kebijakan keuangan Organisasi dan meninjau serta menyetujui anggaran, membentuk suatu badan teknis atau daerah (jika

diperlukan), mempertimbangkan dan menyetujui laporan yang merupakan kegiatan organisasi dan badan, serta mengambil langkah yang dibutuhkan untuk permasalahan yang timbul, menyetujui atau mendelegasikan persetujuan-persetujuan dengan pemerintah dan organisasi internasional, menyetujui atau mendelegasikan persetujuan-persetujuan dengan organisasi swasta atau badan usaha swasta, mempersiapkan dan merekomendasikan perjanjian internasional pada setiap pertanyaan yang jatuh dalam kompetensi Organisasi, memutuskan, sesuai dengan Anggaran Dasar pada aplikasi untuk keanggotaan. Majelis juga harus memilih presiden dan wakil presiden di awal sidang, dan presiden harus memimpin sidang majelis tersebut dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap majelis selama dalam sidang. Presiden juga harus mewakili organisasi pada setiap kesempatan pada masa jabatannya.

b. Dewan Eksekutif

Dewan terdiri dari anggota penuh atau *full members* yang dipilih oleh majelis dengan rasio 1 dewan dengan 5 anggota penuh/ full members. 1 anggota *associate* dan anggota *affiliate* dipilih untuk berpatisipasi dalam pekerjaan dewan tanpa pemungutan suara. Jangka waktu untuk anggota yang dipilih adalah empat tahun kecuali jika satu-setengah dari anggota Dewan yang pertama, yang telah ditentukan oleh banyak orang, harus dua tahun dan pemilihan untuk satu-setengah dari keanggotaan Dewan diadakan setiap dua tahun sekali. Dewan biasanya bertemu 2 kali dalam setahun dan akan memilih ketua dan wakil ketua yang akan memimpin dalam jangka waktu 1 tahun. Dewan juga mengankat peraturan sendiri. Tugas dari Dewan eksekutif ini yaitu, mengambil semua tindakan yang diperlukan dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal, untuk melaksanakan keputusan tersebut dan merekomendasi keputusan tersebut dan dilaporkan kepada majelis, menerima laporan dari Sekretaris Jenderal tentang kegiatan organisasi, mengajukan proposal kepada Majelis, memeriksa program kerja umum Organisasi yang telah dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal sebelum diajukan kepada Majelis, menyampaikan laporan dan rekomendasi mengenai rekening Organisasi dan perkiraan anggaran kepada Majelis, membentuk suatu badan pendukung yang diperlukan untuk kegiatan sendiri, melaksanakan tugas lain yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis. Jika dalam sidang majelis terjadi pertentangan maka dewan harus mengambil semacam administrasi atau keputusan teknis yang diperlukan dan akan melaporkan keputusan yang diambil dalam sidang berikutnya kepada majelis untuk disetujui.

c. Sekertariat

Sekertariat terdiri dari sekertaris jendral dan anggota yang diperlukan. Sekertaris jendral dipilih dalam sidang dengan 2/3 suara dari anggota penuh yang hadir dan harus direkomendasi oleh dewan dalam jangka waktu 4 tahun dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap dewan dan majelis. Sekertaris jendral juga harus menjalankan arahan dari majelis dan dewan, serta harus menyerahkan laporan kegiatan organisasi, rancangan umum program kerja, dan perkiraan anggaran organisasi. Dalam pelaksanaan Sekretaris-Jenderal harus menunjuk staf Sekretariat sesuai dengan peraturan staf disetujui oleh Majelis. Staf Organisasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan pertimbangan terpenting dalam perekrutan staf dan dalam mencegah diskriminasi harus memiliki standar efisiensi, kompetensi teknis dan integritas. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dan staf tidak mencari atau menerima instruksi dari pemerintah atau otoritas lain di luar Organisasi tersebut. Mereka harus menahan diri dari tindakan apapun di luar organisasi karena mereka bertugas sebagai pejabat internasional yang bertanggung jawab hanya untuk Organisasi.

4.1.1.2.4 Anggaran atau *Funding United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)

Anggaran Organisasi, meliputi administrasi organisasi, fungsi dan program kerja umum, yang akan dibiayai dari kontribusi dari anggota penuh, anggota Asosiasi dan anggota *affiliate* menurut skala penilaian yang diterima oleh Majelis dan juga berasal dari sumber-sumber penerimaan lainnya sesuai dengan Aturan Pembiayaan di Anggaran Dasar. Anggaran disiapkan oleh sekertaris jendral dan diserahkan kepada dewan untuk diperiksa dan disetujui oleh majelis.

Laporan keuangan Organisasi harus diperiksa oleh dua auditor dipilih oleh Majelis berdasarkan rekomendasi dari Dewan dengan periode dua tahun dan harus memenuhi syarat untuk pemilihan kembali. Auditor, selain memeriksa rekening, dapat melaksanakan observasi yang dianggap perlu sehubungan dengan efisiensi prosedur keuangan dan manajemen, sistem akuntansi, kontrol keuangan internal dan konsekuensi keuangan praktek administrasi. Setiap anggota memiliki satu suara dan digunakan dalam pengambilan keputusan dalam setiap sidang mengenai hal-hal berkenaan dengan anggaran dan keuangan, lokasi markas besar Organisasi, dan permasalahan-permasalahan lainnya.

4.1.1.2.5 Program-program *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)

Program-program *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) antara lain :

A. *Education and Training*

Dalam hal Pendidikan dan Pelatihan, UNWO menyediakan wadah untuk masyarakat dalam berbagi dan bertukar informasi dan pengetahuan mengenai

kepariwisataan. Seperti *workshop*, e-*learning*, dan lain-lain. Contoh program : *The* UNWTO *Regional Conference and Executive Training Workshop in* Qatar, *Tourism Destination Management in* Bali.

B. *Sustainable Development of Tourism*

Program Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Development of Tourism* - STP) diluncurkan di London, pada 5 November 2014, pada *World Responsible Tourism Day* di *World Travel Market* (WTM) dan ditetapkan untuk memanfaatkan satu miliar wisatawan yang melakukan perjalanan dunia setiap tahun sebagai misi perkembangan wisata. Visinya adalah dalam sektor pariwisata telah mengadopsi praktik konsumsi dan produksi berkelanjutan yang menghasilkan lingkungan dan sosial yang baik dan meningkatkan perekonomian. Program Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Development of Tourism* - STP) menawarkan peluang besar untuk memastikan bahwa pariwisata memberikan kontribusi secara efektif untuk pembangunan berkelanjutan, semua sesuai dengan kerangka *Millenium Development Goal*s (MDGs) yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs). Contoh program : STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) di Pangandaran

C. *Silk Road*

UNWTO Silk Road Program adalah inisiatif kolaboratif yang dirancang untuk meningkatkan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari pengembangan pariwisata bagi masyarakat *Silk Road* lokal, juga mengembangkan investasi dan mempromosikan konservasi warisan alam dan budaya. Selain itu, untuk mendorong kerjasama yang lebih besar antara negara-negara Silk Road, dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang istimewa. Contoh program: Program Indonesia Bebas Visa

4.1.1.3 Kerjasama Indonesia - *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)

Kerjasama Indonesia - UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) terjalin sejak tahun 1993. Indonesia terpilih menjadi Ketua Dewan Eksekutif UNWTO periode 2013-2014. Dalam rapat pleno Sidang Umum ke-20 UNWTO di Livingstone, Zambia, pada 28 Agustus 2013, Indonesia terpilih menjadi Ketua Dewan Eksekutif Organisasi Pariwisata PBB (UNWTO) periode 2013-2014. Untuk periode satu tahun ke depan, peran Indonesia ini akan didampingi oleh Jamaika dan Mozambik sebagai wakil. Terpilihnya Indonesia dari 156 negara anggota UNWTO merupakan sebuah bentuk pengakuan dunia internasional atas peran Indonesia di kancah pariwisata dunia. Selain sebagai ketua Dewan Eksekutif Organisasi Pariwisata PBB (UNWTO), Indonesia juga masih memegang posisi sebagai Anggota Komite Anggaran dan Komite Etik UNWTO. Terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Dewan Eksekutif UNWTO merupakan keuntungan tersendiri karena selain sebagai ajang promosi pariwisata, Indonesia juga bisa mengembangkan pariwisatanya. Indonesia dapat meningkatkan pengurusan visa, pajak, konektivitas, bantuan pemasaran, kerja sama destinasi, bahkan bantuan tenaga ahli. Indonesia juga akan memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai informasi pariwisata secara global (http://www.antaranews.com/berita/437634/indonesia-pimpin-sidang-dewan-eksekutif-un-wto Diakses pada 27 Juni 2015).

Indonesia termasuk salah satu anggota dari organisasi pariwisata dunia atau UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*). Karena itu Indonesia telah mengadopsi Kode Etik Pariwisata Dunia (*Global Code of Tehics For Tourism*) yang dibuat oleh organisasi PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yang khusus menangani kegiatan pariwisata dunia. Kode Etik Pariwisata Dunia terdiri atas 10 (sepuluh) pasal, yakni: Kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat, kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorang maupun secara kolektif, kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan, kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri, kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan, kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan, hak dasar berwisata, kebebasan bergerak wisatawan, hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata, pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataan Dunia.

Setiap negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut tentunya oleh UNWTO diharapkan agar dapat menjalankan semua pasalnya. Indonesia bukan cuma mengadopsi Kode Etik Pariwisata Dunia, akan tetapi juga sudah mampu untuk menerapkannya. Hal ini dilihat dari sisi penguatan hukum melalui perundang-undangan dan implementasi di lapangan. Kemampuan utama Indonesia, adalah adanya sensitifitas terhadap lingkungan. Etika lingkungan berjalan sangat baik, seperti di Bali dimana pantai dan hutannya sangat terjaga.

Adapun alasan mengapa Indonesia menjadi anggota dan bergabung dalam organisasi UNWTO, adalah karena sektor pariwisata menjadi salah satu andalan perekonomian Indonesia. Ada sebanyak 155 negara yang terdaftar sebagai anggota UNWTO dimana semuanya telah mengadopsi Kode Etik Pariwisata Dunia. Namun ada pula beberapa di antaranya tidak menerapkan kode etik tersebut secara nyata di lapangan. Masih banyak pelanggaran-pelangaran yang dilakukan, yakni antara lain berupa eksploitasi anak dan perempuan dalam penyelenggaraan kegiatan

kepariwisataan. Negara-negara anggota UNWTO yang mengadopsi Kode Etik Pariwisata Dunia diberi tanggungjawab secara mandiri dalam penerapannya di lapangan. Pengapdosiannya pun berbeda-beda dari setiap negara anggota UNWTO. Ada negara yang mencantumkannya dalam undang-undang kepariwisataannya dan ada juga yang hanya menyelipkannya dalam undang-undang atau aturan lain yang berkaitan dengan kepariwisataan negara tersebut. Tidak ada persyaratan khusus yang sifatnya mengikat, karena prinsipnya menjadi anggota UNWTO adalah bersifat sukarela. Kode Etik Pariwisata Dunia dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memajukan bidang pariwisata dunia, salah satunya adalah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan kepada setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu negara.

Dalam *preambule* Kode Etik Pariwisata Dunia UNWTO, ditegaskan bahwa Para anggota dalam UNWTO bertekad sebagai Organisasi Pariwisata Dunia (UWTO) menekuni sejak Resolusi 364 (XII) yang diterima pada Sidang Umum tahun 1997 (Istambul) untuk memajukan kemitraan yang sejati antara para pelaku publik dan swasta bagi perkembangan pariwisata, dan mengharapkan timbulnya suatu kemitraan dan suatu kerjasama yang meluas, secara terbuka dan berimbang, pada hubungan antar negara asal dan penerima dan pada industri pariwisata mereka masing-masing.

Menunjuk terutama pada instrumen-instrumen: Deklarasi universal Hak-hak Azasi Manusia 10 Desember 1948, Pakta Internasional tentang Hak-hak Ekonomi dan Sosial Budaya 16 Desember 1966, Pakta internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 16 Desember 1966, Konvensi Warsawa tentang Angkatan Udara 12 Oktober 1929, Konvensi Chicago di bidang Perhubungan Udara Internasional 7 Desember 1944, Konvensi Tokyo - Den Haag dan Montreal tentang hal yang sama, Konvensi tentang Fasilitas Kepabeanan untuk Wisatawan 4 Juli 1954 beserta Protokol yang menyertainya, Konvensi tentang Perlindungan Warisan Kekayaan Budaya dan Alam Dunia 23 November 1972, Deklarasi Manila tentang Pariwisata Dunia 10 Desember 1980, Resolusi Sidang Umum UWTO VI di Sofia yang menyetujui Charter Pariwisata dan Kode Pariwisata 26 September 1985, Konvensi tentang Hak-hak Anak 26 Januari 1990, Resolusi Sidang Umum UWTO IX (Buenos Aires) tentang Pemberian Kemudahan bagi Perjalanan demikian pula tentang keamanan dan perlindungan wisatawan 4 Oktober 1991, Deklarasi Rio de Jenairo tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan 13 Juni 1992, Persetujuan umum tentang Perdagangan Jasa 15 April 1994, Konvensi tentang Bio-diversitas 6 Januari 1995, Resolusi Sidang Umum ke-XI Organisasi Pariwisata Dunia (Kairo) tentang larangan pariwisata seksual terorganisasi 22 Oktober 1995, Deklarasi Stockholm melawan Eksploitasi Seksual Anak-anak untuk Tujuan Komersial 22 Mei 1997, Konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi yang diterima oleh Organisasi Pekerja Internasional (ILO) dalam bidang konvensi koletif tentang larangan kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak, mempertahankan hak-hak rakyat pribumi, perlakuan yang sama dan anti diskriminasi dalam pekerjaan.

UNWTO juga mempromosikan *green tourism* (pariwisata hijau), sebagai salah satu obyek penarik turis sekaligus sebagai program pelestarian alam. Rangkaian kegiatan yang dilakukan termasuk seminar, lokakarya, publikasi dan lain-lain. Mengingat Indonesia memiliki banyak lokasi wisata alam, *green tourism* dapat menjadi salah satu bidang kerjasama dengan UNWTO. UNWTO pun memfokuskan diri pada pemanfaatan situs-situs budaya untuk mendukung pariwisata. Untuk itu UNWTO melakukan serangkaian kegiatan seperti penelitian di situs-situs budaya, seminar dan publikasi untuk mempromosikan situs budaya serta penelitian lapangan untuk membantu pemerintah setempat memanfaatkan situs budayanya.

Mengingat pariwisata merupakan salah satu andalan untuk mendatangkan devisa, kerjasama di forum internasional dan regional seperti UNWTO sangat penting, terutama untuk menjalin kerjasama pelatihan, penanaman modal dan tukar menukar pengalaman. Khusus untuk UNWTO, organisasi ini memiliki *Business Council* yang beranggotakan badan-badan pariwisata non-pemerintah. Departemen Luar Negeri menyambut baik dukungan *Executive Council* UNWTO agar Masyarakat Pariwisata menjadi anggota UNWTO *Business Council*, mengingat pariwisata adalah bisnis yang sangat kompleks sehingga peran serta swasta dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilannya. Selain itu, dalam Sidang Dewan Eksekutif ke-70 di Madrid bulan Juni 2003, wakil Indonesia yaitu Prof. Dr. Emil Salim dikukuhkan sebagai anggota *World Committee on Tourism Ethics* tahun 2003-2005. WCTE sendiri merupakan badan independen yang terdiri dari tokoh-tokoh yang diakui kompetensinya dalam bidang pariwisata, yang bertugas untuk memberikan masukan-masukan kepada anggota UNWTO terkait dengan perlindungan pariwisata sesuai dengan kode etik kepariwisataan. Selaku anggota komite, Indonesia telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan kode etik yang dimaksud. Di samping itu, pada Sidang Umum UNWTO yang ke-19 di Gyeongju, Republik Korea, tanggal 8-14 Oktober 2011, Indonesia terpilih sebagai anggota *Executive Council* UNWTO untuk periode 2011-2013.

Focal point untuk kegiatan UNWTO Indonesia adalah Kementerian Pariwisata. Yang layak untuk dikaji dan ditindaklanjuti oleh adalah program ekoturisme yang dikembangkan UNWTO. Program ini sejalan dengan ide *sustainable development* dimana obyek wisata alam harus dijaga sedapat mungkin kelestariannya, terutama mengingat keberadaannya untuk memelihara keseimbangan alam. Selain itu, dapat

menjalin kerjasama program wisata budaya, melengkapi kerjasama yang sudah terjalin dengan UNESCO, untuk menjaga kelestarian situs-situs budaya Indonesia.

Program-program pengembangan kepariwisataan Indonesia dan UNWTO berkontribusi langsung bagi pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) terutama MDG 1 (pemberantasan kemiskinan dan kelaparan), MDG 3 (kesetaraan gender), MDG 7 (kelestarian lingkungan), dan MDG 8 (kemitraan global untuk pembangunan).

Kesepakatan Indonesia dengan UNWTO adalah untuk mengembangkan pariwisata agar lebih maksimal lagi. Hal tersebut berupa pengembangan metode penghitungkan wisatawan nusantara, destinasi wisata, serta pariwisata berkelanjutan. Indonesia meminta agar UNWTO membantu pengembangan pariwisata di Indonesia. Dan UNWTO berkomitmen membantu Indonesia. Indonesia dan UNWTO juga memastikan agar setiap negara ASEAN meninggalkan *institutional legacy* dalam kesepakatan program pariwisata berkelanjutan. Artinya jika suatu saat terjadi pergantian menteri atau level pimpinan lainnya, maka tidak akan mengubah kesepakatan yang sudah ada.

Salah satu contoh kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO dalam bidang pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah program STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in* Pangandaran) yang dimaksudkan untuk menjadi model langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya (http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperatio&IDP=2&P=Multilateral&l=id Diakses pada 15 Juni 2015).

4.1.1.3.1 *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran

Program ini diinisiasi oleh UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) dan Biodiversity Unit didukung oleh *Federal Ministry of Environment and Nuclear Safety of Germany* dalam skema program ICI (*International Climate Initiative*) serta bekerjasama dengan Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini bermaksud mengembangkan pilihan-pilihan bagi pelaku pariwisata untuk ikut mengantisipasi perubahan iklim dan pengembangan pariwisata hijau, baik melalui aspek mitigasi dan adaptasi.

Dalam program STREAM, pemangku kepentingan (*stake holder*) bekerjasama dengan hotel dan restoran anggota PHRI untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan energi efisiensi, yang dikombinasikan dengan berbagai pelatihan manajemen energi. STREAM juga mengembangkan percontohan energi terbaharukan yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan wisata. Kegiatan adaptasi termasuk transplantasi karang meneruskan kegiatan yang telah diinisiasi program UNWTO *Tourism Development Supporting Biodiversity Conservation* di Pangandaran pada tahun 2008-2010, sekaligus penanaman mangrove di pesisir Pangandaran. Seluruh kegiatan adaptasi akan dihubungkan untuk mendukung pengembangan pariwisata pasca tsunami.

Sektor pariwisata memiliki kontribusi untuk memperparah dampak dari perubahan iklim yang mungkin terjadi, namun pada saat yang bersamaan, pariwisata juga memiliki kontribusi untuk memperlambat dan mengurangi dampak tersebut. STREAM merupakan program kolaborasi antara Indonesia (melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) yang didukung oleh mitra utama dan lokal seperti INDECON, IESR, dan Adelphi telah berjalan semenjak tahun 2011 hingga 2013. STREAM merupakan model inovatif dari tindakan-tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dengan mengadopsi pendekatan efisiensi energi dan pada saat yang bersamaan menguatkan struktur lokal untuk keberlanjutan Pangandaran, yang merupakan salah satu tujuan pariwisata di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendanaan program STREAM berasal dari Kementerian Federal untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir Jerman.

Kegiatan STREAM telah mendapat banya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah desa dan Pemda Ciamis telah memutuskan kawasan ini sebagai kawasan sabuk hijau untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi ini. STREAM terus memperkuat kerjasama dengan dinas pendidikan setempat, dimana sekitar 18 sekolah terlibat dalam kegiatan-kegiatan STREAM dan sekitar 450 orang pelajar bergabung sebagai Duta Mangrove Pangandaran (diresmikan oleh UNWTO, November 2012).

Program ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan destinasi yang mengimplementasikan prinsip ramah lingkungan hingga tingkat teknis; sehingga bisa diadopsi di destinasi lain di Indonesia. Program ini juga diharapkan meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia dalam menjawab tantangan global pasar wisata dunia, yang terpengaruh oleh meningkatkan kesadaran untuk perubahan iklim (STREAM *brochure* 2013).

4.1.1.3.1.1 Mitra Utama dan Mitra Lokal Program STREAM

Kerjasama Indonesia - UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in*

Pangandaran) di Pangandaran juga didukung oleh beberapa mitra utama dan mitra lokal, antara lain adalah:

1. Mitra Utama

a. INDECON (*Indonesia Ecotourism Network*)

INDECON adalah lembaga non-profit yang bergerak dalam pengembangan dan promosi ekowisata di Indonesia. Dalam program STREAM ini INDECON ikut serta dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM di Pangandaran dan sebagai mitra teknis. Dalam program STREAM ada dua inti yang menjadi fokus adalah Adaptasi dan Mitigasi. INDECON berpartisipasi dalam hal Adaptasi, dimana program STREAM yang mengusung *green tourism* (pariwisata hijau) sejalan dengan visi misi INDECON dalam hal ekowisata yang tujuannya searah yaitu untuk *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan).

b. IESR (*Institute for Essential Services Reform*, Indonesia)

IESR adalah lembaga non-profit, yang dirancang sebagai lembaga pemikir (*think tank*) bagi masyarakat sipil yang secara aktif menginspirasi, mendorong, dan mendukung perubahan-perubahan ke arah keadilan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mendukung pembangunan manusia. IESR memegang tanggung jawab untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan mitigasi. IESR telah melakukan audit energi di hotel-hotel dan restoran (November 2012) di Pangandaran dan Batu Karas, untuk mengukur potensi penghematan energi serta tindakan-tindakan yang mungkin untuk dilakukan, serta mengidentifikasi tindakan-tindakan konservasi energi. IESR bekerja sama dengan pihak pengelola hotel, meningkatkan kapasitas mereka di sisi sistem pengelolaan energi dan perubahan iklim, meningkatkan kesadaran mereka, juga meningkatkan kapasitas dari pemerintah setempat, Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia, juga kelompok-kelompok lokal, mengenai efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim. Program ini juga melibatkan pemerintah lokal dan kabupaten untuk mengembangkan perencanaan pembangunan rendah karbon. IESR juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan di wilayah Pangandaran serta implementasi dari teknologi-teknologi keberlanjutan energi. IESR melakukannya dengan cara survey lapangan untuk melihat potensi energi terbarukan dan pilihan-pilihan untuk penerapanan teknologi energi terbarukan di tingkat komunitas.

c. *Adelphi*, Germany

Adelphi adalah lembaga non-profit yang berbasis di Jerman, berperan sebagai tenaga ahli internasional dalam bidang energi, iklim, dan proyek pengembangan program STREAM di Pangandaran.

2. Mitra Lokal

Program STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in* Pangandaran) melibatkan partisipasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis, *Local Working Group* (LWG) Pangandaran, dan masyarakat Pangandaran (UNWTO *document*).

4.1.2 Analisa Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian atau informan dalam penelitian sangatlah penting, bahkan menjadi kunci utama. Sebab, subyek penelitian adalah pihak yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam suatu penelitian, serta mendukung peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang nantinya data tersebut akan diolah, dianalisis, dan disusun secara sistematis oleh peneliti. Bahkan informan dapat memberikan informasi atau data yang tidak bisa didapatkan melalui situs atau data yang dipublikasikan. Dalam hal ini, peneliti memastikan dan memutuskan siapa yang berhak memberikan informasi yang relevan sehingga mampu menjawab pertanyaan peneliti.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti telah memperoleh data dari berbagai sumber yang dilakukan melalui studi pustaka berupa tulisan atau artikel, penulusuran data online berupa data yang berasal dari situs-situs tertentu, metode dokumentasi berupa catatan, buku, dokumen (*brochure* atau *annual report*) dan wawancara dengan melakukan studi lapangan ke lembaga-lembaga terkait.

Untuk menguji validitas dan realibilitas data yang telah diperoleh, peneliti mengakses situs-situs resmi pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian, yaitu situs Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai situs resmi pemerintah dimana Indonesia bekerjasama dengan UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peneliti juga mengakses situs UNWTO, peneliti melakukan konfirmasi langsung ke kantor Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dimana peneliti diberikan akses untuk wawancara dengan nara sumber yang berkaitan langsung dengan Kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO yaitu, *Asst Deputy Director for* UNWTO *Ministry of Tourism The Republic of* Indonesia, banyak hal yang peneliti dapatkan, yaitu seputar kinerja *United Nations World Tourism Organizaton* (UNWTO) secara umum, kerjasama dengan Indonesia, dan mengenai pelaksanaan program *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran* (STREAM) di Pangandaran dan upaya mengembangkan pariwisata hijau.

Dari semua laporan dan data online yang peneliti kumpulkan, Dan semua informasi yang telah dipublikasikan secara resmi melalui situs-situs tersebut

sudah diuji kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan maka situs tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji data yang telah diperoleh.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kondisi Pariwisata di Pangandaran sebelum adanya kerjasama Indonesia - UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) di Pangandaran.

Sumber daya alam dan lingkungan dalam ekonomi memiliki tiga fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai persediaan bahan baku untuk rumah tangga dan perusahaan yang bergantung pada air, udara serta keperluan lain seperti mineral dan tenaga. Kedua, sebagai tempat pembuangan limbah dari rumah tangga dan perusahaan. Ketiga adalah sebagai penyedia fasilitas lingkungan yang menyediakan keindahan dan estetika (Djajadiningrat, 2013:18).

Pariwisata berkembang pemanfaatannya berdasarkan fungsi ketiga dari sumber daya alam dan lingkungan. Pariwisata dianggap sebagai salah satu usaha pemanfaatan alam yang dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan estetika sumber daya alam dan lingkungan.

Secara global pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang terus meningkat kontribusinya terhadap pendapatan negara. Berdasarkan data WTTC (*World Travel and Tourism Council*) pada tahun 2004, pertumbuhan rata-rata industri pariwisata adalah sebesar 4,6%. Perkembangan pariwisata meliputi pembangunan fisik obyek wisata yang dijual, baik berupa fasilitas akomodasi, restoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, angkutan wisata, maupun perencanaan promosi, disebut sebagai komponen pariwisata (http://www.academia.edu/7701501/STRATEGI_PENGEMBANGAN_PARIWISATA_DI_INDONESIA Diakes pada 10 Januari 2016).

Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, terjadilah perubahan pada komponen lingkungan sebagai penyangganya. Pengembangan pariwisata menimbulkan 2 tipe dampak, dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berupa konservasi kawasan alam, konservasi lokasi sejarah dan arkeologi serta bentukan khas, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesadaran lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa polusi air, polusi udara, polusi suara, polusi pemandangan, masalah pengolahan limbah, penurunan ekologi, bencana lingkungan, kerusakan situs-situs bersejarah dan arkeologi, serta permasalahan guna lahan.

Pesisir merupakan salah satu lokasi yang sangat baik sebagai objek daya tarik wisata. Pariwisata pesisir merupakan kombinasi antara komponen daratan dan laut yang menyajikan keindahan berupa air laut, pantai, keanekaragaman biota laut maupun darat, keragaman budaya dan adat istiadat, makanan segar dan infrastruktur yang baik. Pariwisata pesisir ini sebenarnya sangat bergantung pada kondisi alam (iklim, bentang alam, dan ekosistem) dan budaya (sejarah, adat istiadat, kesenian, kerajinan, dan lain-lain). Dari sinilah berangkatnya pemikiran bagaimana keadaan lingkungan di sebuah kawasan pariwisata pesisir. Salah satu kawasan pesisir di pulau Jawa yang telah berkembang sejak lama sebagai salah satu primadona wisata pantai adalah pantai Pangandaran. Perkembangan yang cukup pesat terjadi di Kawasan Wisata Pangandaran, mulai dari perkembangan daya tarik berupa olahraga bersepeda, berenang, voli pantai, menyelam, kemudian perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut bertujuan agar membuat nyaman wisatawan ketika berada di kawasan wisata Pangandaran. Akan tetapi tanpa disadari semua hal tersebut bisa saja menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan fisik.

Perkembangan pariwisata yang ada di Kawasan Wisata Pangandaran dapat dilihat dari data komponen-komponen pariwisata, yaitu jumlah kedatangan wisatawan, jumlah akomodasi, dan jumlah rumah makan yang ada.

4.2.2 Upaya-upaya apa yang dilakukan Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran.

STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) sebagai bentuk kerjasama yang terjalin antara UNWTO dengan Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata hijau di Pangandaran. Kesepakatan kerjasama tersebut berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta pada tanggal 13 Juni 2011 dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Kementerian, Pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis, masyarakat Pangandaran dan lembaga internasional. Program tersebut merupakan program pengembangan pariwisata yang mendukung *green tourism - sustainable tourism*. Program efisiensi energi untuk pariwisata berkelanjutan tersebut dilakukan dengan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi. Kawasan wisata Pangandaran dipilih karena lokasi ini memainkan peranaan penting dalam pembangunan daerah. Namun akibat bencana tsunami tahun 2006, pariwisata di Pangandaran merosot tajam, bahkan semua fasilitas dan sarana pendukung pariwisata di kawasan tersebut rusak. Sehingga, hal inilah yang melatarbelakangi hadirnya program STREAM, yang

merupakan program pertama di Indonesia (STREAM *brochure*).

Adapun lingkup wilayah yang termasuk dalam wilayah kerja program STREAM ini adalah desa Pangandaran, Panunjang, Babakan dan Wonoharjo yang termasuk dalam kecamatan Pangandaran. Selain itu, desa lainnya yang juga menjadi cakupan program ini adalah desa Cikembulan, kecamatan Sidamulih. Kelima wilayah tersebut merupakan desa-desa yang dipilih untuk dilaksanakannya program STREAM.

Tujuan dari kerjasama dalam program STREAM tersebut secara umum adalah untuk menciptakan model percontohan inovasi dalam kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi dalam merespon perubahan iklim di Indonesia, sehingga dapat direplikasi di destinasi-destinasi wisata lainnya. Sedangkan sasaran dalam program tersebut guna mencapai tujuannya yaitu, peningkatan kesadaran dan kapasitas untuk masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah, sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam tahap perncanaan maupun pengelolaan program.

Program STREAM dilaksanakan dari tahun 2011 hingga 2013. Kegiatan-kegiatan inti program meliputi:



Kegiatan Inti Program STREAM

Sumber: (STREAM *brochure*).

Kegiatan utama dalam program STREAM di Pangandaran mencakup kegiatan mitigasi dan adaptasi. Dalam kegiatan mitigasi, terdapat dua kegiatan yang dilakukan, yaitu reduksi emisi karbon di industri hotel dan pengembangan energi terbarukan untuk fasilitas pariwisata. Sedangkan dalam kegiatan adaptasi, terdapat tiga kegiatan pokok, yaitu penanaman mangrove dan terumbu karang, peningkatan kesadaran publik dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan tanggap terhadap perubahan iklim. Secara rinci kegiatan dalam program STREAM antara lain:

A. Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan adaptasi yang dilakukan dalam proyek STREAM mencakup kegiatan panduan adaptasi lokal, kegiatan percontohan adaptasi dan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk merehabilitasi mangrove dan restorasi terumbu karang di kawasan wisata Pangandaran. Kegiatan rehabilitasi mangrove, lokasinya adalah Sinyangkalag, Bojongsalawe, Karang Tirta, dan Bulaksetra. Sedangkan lokasi untuk merestori terumbu karang dilakukan di Batu Karas, Karang Jalagri, pantai timur Pangandaran dan Bagolo. Kegiatann adaptasi perubahan iklim diantaranya:

a. Kegiatan Percontohan Rehabilitasi Mangrove

Kawasan yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata, bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan biro perjalanan wisata lokal pemerintah desa. Narasumber pelatihan adalah Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) koordinator Wilayah Jawa Barat dengan materi pelatihan pengenalan ekosistem mangrove, teknik penanaman mangrove yang benar dan teknik pembibitan benih mangrove.



Bulaksetra Lokasi Program Percontohan Mangrove

Sumber: (UNWTO dokumentasi).

Gambar 4.3 adalah lokasi Program Percontohan Rehabilitasi Mangrove, terdapat bebarapa lokasi ekosistem mangrove di sekitar Pangandaran, diantaranya adalah Bulaksetra, Karangtirta, Bojong salawe dan Batu karas. Saat ini, Bulaksetra dinilai paling baik dalam memenuhi kriteria secara biologi, lingkungan, maupun sosial dan ekonomi untuk dijadikan sebagai program percontohan STREAM rehabilitasi mangrove. Kondisi fisiografi pantai Bulaksetra merupakan daratan dengan ketinggian antara 0 – 1,5 m. Rehabilitasi mangrove dapat melindungi kawasan pemukiman dari ancaman bencana alam yang datang dari laut bagi masyarakat 3 dusun di desa Babakan; yaitu dusun KalapaTiga, Bojong karekes dan Kamurang yang dihuni oleh 1.556 kk dengan jumlah penduduk 5.618 jiwa (data monografi desa Babakan 2011). Ekosistem mangrove di Bulaksetra berfungsi sebagai tempat mengasuh dan membesarkan (*nursery ground*) dan tempat mencari makan (*feeding ground*) bagi beberapa biota laut yang bernilai ekonomis seperti bandeng, kepiting, udang, dan lain-lain.

b. Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove

Pelaksanaan penanaman bibit mangrove dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar desa Babakan, organisasi kemasyarakatan dan anak-anak sekolah. Bibit yang ditanam jenis pidada atau bogem (Sonneratia sp) dan api-api (Avicennia sp) sebanyak 5000 pohon didatangkan dari lokasi pembibitan Cilacap. Selanjutnya, penanaman akan menggunakan bibit mangrove hasil pembibitan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Bulaksetra.

c. Kegiatan Pembibitan



Gambar 4.4

Kegiatan Pembibitan Mangrove

Sumber: (UNWTO dokumentasi).

Pelaksanaan pembibitan dilakukan oleh kelompok masyarakat penangkar tanaman mangrove yang dikoordinir oleh Pemerintah Desa Babakan dengan menunjuk KSM Ilalang sebagai Koordinator pelaksana. Tujuan pembibitan adalah menyediakan bibit yang sesuai kondisi ekologi Bulaksetra dan mudah beradaptasi sehingga diharapkan tingkat keberhasilan tumbuh tanaman mangrove tinggi. Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar Bulaksetra dengan menyediakan bibit mangrove untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

d. Program Edukasi



Pelatihan Teknis Pembibitan dan Penanaman Mangrove

Sumber: (UNWTO dokumentasi).

Untuk menjamin keberlanjutan rehabilitasi ekosistem pesisir, murid-murid sekolah di Pangandaran dilibatkan dalam kegiatan dan penanaman mangrove. Kegiatan ini akan diintegrasikan kedalam muatan lokal pendidikan lingkungan hidup di sekolah, anatara lain:

1. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

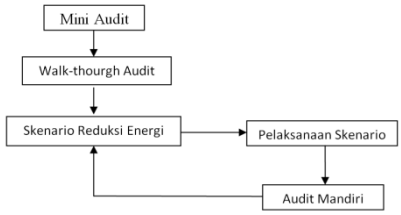
Adaptasi salah satu keluaran dari program STREAM adalah tersedianya dokumen LAG (*Local Adaptation Guide*) untuk perubahan iklim Pangandaran yang disusun oleh mitra kerja bersama pemangku kepentingan ditingkat lokal. Serangkaian Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dilakukan untuk mengumpulkan data dan mengetahui dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat dan ekosistem di Pangandaran serta upaya adaptasi yang dapat dilakukan. Kegiatan FGD dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2011 di 5 desa yaitu Pangandaran, Babakan, Sidomulyo, Pananjung dan Cikembulan. Masing-masing FGD diikuti oleh kelompok masyarakat yang mewakili beberapa mata pencaharian diantaranya nelayan, petani pemilik lahan, petani penggarap, pegawai hotel dan restoran, pegawai negeri dan penyedia jasa wisata (pengrajin, penjual cinderamata, sewa perahu dll). Hasil diskusi menunjukkan bahwa perubahan iklim mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap mata pencaharian masyarakat Pangandaran. Pendapatan para petani semakin berkurang karena iklim yang tidak menentu sehingga mengakibatkan gagal panen. Nelayan mengalami kesulitan untuk mencari ikan di laut karena cuaca yang sulit diprediksi dan sering terjadi badai yang tidak dapat diduga sebelumnya saat berada di tengah laut. Pendapatan sektor pariwisata pun menurun akibat kunjungan wisatawan berkurang karena cuaca ekstrim. Rusaknya ekosistem pesisir memperburuk daya tahan Pangandaran terhadap dampak perubahan iklim. Hutan mangrove banyak yang berubah fungsi menjadi pemukiman dan tambak. Kawasan pantai menjadi sempit akibat abrasi karena tanaman pantainya sudah tidak ditemukan lagi. Muara sungai menjadi sempit dan dangkal akibat sedimentasi yang tinggi karena hutan di hulu dan sepadan sungai sudah tidak lagi ditumbuhi pohon penahan erosi. Bagitu juga dengan ekosistem terumbu karang yang sudah rusak akibat pemancingan ilegal, penambangan karang, sedimentasi, dan pengembangan pariwisata yang tidak ramah lingkungan.

B. Mitigasi Perubahan Iklim

Dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim ini, lingkungan dan iklim sangat berperan penting dalam mendukung pariwisata di Pangandaran. Oleh karena itu, menekan dampak kegiatan pariwisata terhadap alam dan lingkungan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk keberlangsungan pariwisata di Pangandaran. Untuk menekan dan mengurangi dampak emisi gas rumah kaca dari sector pariwisata, program STREAM berusaha untuk menerapkan efisiensi energi dan mengembangkan energi terbarukan sebagai contoh solusi-solusi yang dapat diterapkan di Pangandaran. Kegiatan yang diterapkan berupa pengumpulan data, penyusunan data dasar, peningkatan kesadaran masyarakat secara lebih luas, peningkatan kapasitas

untuk para pemangku kepentingan, monitoring dan evaluasi, serta penerapan pembelajaran terbaik di destinasi-destinasi lainnya.

Dua kegiatan pokok dalam mitigasi perubahan iklim ini antara lain adalah reduksi emisi karbon di industri hotel, dan pengembangan energi terbarukan untuk fasilitas pariwisata. Dua kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas kegiatan-kegiatan adaptasi yang dilakukan dalam program STREAM.



Kegiatan Mitigasi oleh Industri Pariwisata

Sumber: (STREAM *brochure*).

a. Kegiatan Reduksi Emisi Karbon di Industri Hotel

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk pemilik hotel dan restoran serta unit usaha lainnya yang mendukung keberlangsungan pariwisata di Pangandaran. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di hotel-hotel, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pihak akan konsep mitigasi perubahan iklim, khususnya mengenai efisiensi energi dan kontribusi emisi karbon pada industri hotel.

Dalam kegiatan ini dilakukan pertemuan-pertemuan dengan para pihak, seperti pertemuan dengan manager-manager hotel. Pertemuan forum manager yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2012 menjadi salah satu mediabagi PHRI, Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif serta Indecon untuk mensosialisasikan kembali program mitigasi dalam kerangka kegiatan STREAM. Dalam forum ini para manager hotel diajak untuk berperan serta dalam proses kegiatan mitigasi. Keterbukaan informasi mengenai proses keterlibatan dalam program mitigasi dan manfaat yang didapat oleh hotel atas partisipasinya, mengundang ketertarikan para manager hotel untuk berpartisipasi. Saat ini terdapat 16 unit usaha pariwisata yang bersedia untuk berpartisipasi.

Proses Mini Audit dilaksanakan pada tanggal 1 – 14 Februari 2012 dilakukan mini audit bagi hotel, restoran dan juga kios untuk melihat pola konsumsi energi dan korelasinya dengan aktifitas pariwisata di Pangandaran. Ditemukan beberapa upaya penghematan secara dini oleh pengelola, namun ditemukan pula konsumsi yang berlebihan yang dilakukan oleh pengelola dalam menjalankan usahanya.

b. Pengembangan Energi Terbarukan untuk Fasilitas Pariwisata

Energi terbarukan menjadi salah satu alternatif yang akan dikembangkan dalam upaya mendukung keberlanjutan aktivitas pariwisata di Pangandaran. Tidak hanya memberikan peluang untuk mendukung sektor usaha masyarakat, tetapi juga ikut serta memberikan solusi bagi kebutuhan energi oleh masyakat maupun pemerintah. Berdasarkan karakter umum kawasan, rangkaian survei dilakukan untuk mengetahui potensi energi terbarukan, antara lain *picohydro*, briket arang, biogas, maupun tenaga surya.

Adapun lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi untuk sumber energi terbarukan antara lain adalah aliran sungai Citumang dan air terjun di Desa Kersaratu untuk potensi *picohydro*, kandang sapi di Sidomulyo untuk potensi biogas, briket arang di beberapa titik di Desa Sidomulyo dan Cijulang, dan juga potensi tenaga surya untuk diaplikasikan di beberapa titik seperti kawasan pantai Pangandaran, Green Canyon, Citumang dan juga Batu Karas. Sebagai hipotesis awal, sumber energi terbarukan di titik-titik tersebut berpotensi untuk dikembangkan namun masih dalam skala kecil. Selain itu, sebagian sumber energi juga terletak jauh dari kawasan pariwisata, sehingga perlu direncanakan dengan baik integrasinya dengan aktivitas pariwisata.

C. Kampanye Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Secara umum bertujuan untuk memperkenalkan isu perubahan iklim, memperdalam pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Kegiatan kampanye dalam program STREAM antara lain:

a. Parade Lingkungan Bersih

Di dalam festival kuliner Pangandaran 2011, berbagai informasi tentang pariwisata berkelanjutan, efisiensi energi, dan program STREAM tersedia di stand program STREAM. Lebih dari 50 siswa-siswi sekolah dasar dan menengah di Pangandaran mengedukasi para penjual dan pengunjung festival kuliner untuk membuang sampah pada tempatnya dengan berkeliling menggunakan becak kecil sembari mengumpulkan sampah di area festival.

b. Diskusi mengenai Isu Perubahan Iklim dengan Siswa-siswi SMP

Murid-murid SMP berpotensi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan adaptasi seperti rehabilitasi mangrove dan terumbu karang nantinya.

c. Kampanye di Sekolah melalui Permainan Edukasi Ular Tangga

Anak-anak diharapkan dapat memberi pengaruh positif kepada orang tuanya (sebagian besar nelayan dan pedagang) untuk berperilaku lebih ramah lingkungan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat, kerjasama dengan UPTD Pendidikan Pangandaran telah terjalin untuk melanjutkan kegiatan ini di sekolah-sekolah lainnya di Pangandaran.

4.2.3 Kendala apa yang dihadapi oleh Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran.

Dalam kerjasama Indonesia - UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM di Pangandaran dapat dikatakan berhasil, namun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi berbagai pihak, kendala yang utama adalah masyarakat tidak mengetahui apa itu STREAM, masyarakat tidak memahami, dikarenakan penggunaan bahasa yang kurang dapat dicerna oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak mengetahui betul program STREAM, masyarakat lebih mengenal program STREAM dengan sebutan Program Hemat Energi. Yang kedua, pada saat itu Pemerintah Indonesia melihat program dari UNWTO ini bisa mengambil alih ranah. Karena UNWTO membentuk kelompok yaitu LWG (*Local Working Group*), LWG ini diberikan SK oleh Bupati, ketika proses bekerja datangnya bukan ke Dinas Pariwisata, namun kje LWG, LWG bekerja dilapangan sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan. Terkadang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah, namun hal itu dapat diantisipasi (Wawancara, Dinas Pariwisata Pangandaran).

Ada pula kendala lainnya yang banyak ditemukan disemua jenis usaha di Pangandaran baik itu hotel atau penginapan, warung atau restoran dan juga kios adalah kurangnya data mengenai konsumsi energi, jumlah kamar terjual, jumlah kamar permalam yang terjual dan data lainnya yang penting untuk dimiliki, jika ingin mengetahui secara pasti berapa konsumsi energinya dan hubungannya dengan penentuan harga produk dan untung rugi dalam operasional usaha. Hal tersebut disebabkan oleh pola manajemen yang masih bersifat kekeluargaan. Terlepas dari semua permasalahan yang ada, para pengelola atau pemilik usaha pariwisata di Pangandaran yang menjadi objek audit sangat antusias dalam mengikuti proses audit. Mereka merasa dibukakan pintu informasi dan wawasan bahwa banyak hal dapat dilakukan dalam *interview* dengan salah satu pemilik restoran. (Wawancara, Dinas Pariwisata Pangandaran).

4.2.4 Hasil dari kerjasama Indonesia - *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures* (STREAM) di Pangandaran.

Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata hijau di Pangandaran, kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dengan UNWTO selama 3 tahun, terhitung mulai tahun 2011 hingga 2013, melalui program STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) dinilai berhasil. Indikator-indikator keberhasilan tersebut dapat terlihat dari sarana dan prasarana yang lebih layak dan memadai, peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata di Pangandaran, serta partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Dalam hal penurunan penggunaan energi sangat berkurang 60% sampai dengan 70%. Dalam penggunaan listrik di hotrl-hotel, restoran, dan lain-lain.

Program STREAM merupakan contoh praktis dari keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata. Hingga April 2014, hampir seluruh program ini telah dilaksanakan dan dimonitor oleh mitra lokal. Salah satu kunci keberhasilan program STREAM adalah keterlibatan komunitas lokal. Selain itu, juga terdapat indikator-indikator lain yang dapat menunjukkan keberhasilan Pariwisata Hijau melalui program STREAM di Pangandaran, yaitu antara lain:

1. Keberhasilan masyarakat desa Babakan, Pangandaran dalam mengikuti PNPM Pariwisata (Program Nasional Pemberdayaan Pariwisata) yang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.75 juta. Dalam program tersebut, masyarakat desa Babakan berhasil mendapatkan kesempatan untuk memajukan desa mereka dengan meningkatkan fasilitas, seperti memperbaiki "Saung Edukasi Mangrove Bulaksetra", pemasangan jalan setapak di kawasan Mangrove Bulaksetra, dan pelatihan kepemanduan wisata oleh kelompok pemandu wisata Bulaksetra. Terdapat 17 program PNPM yang dimulai sejak 4 November 2013. Dengan adanya bantuan dana tersebut, maka dapat meningkatkan sarana dan perbaikan fasilitas di kawasan wisata Pangandaran, sehingga wisatawan yang berkunjung meningkat.

2. Penerapan energi terbarukan dan sistem pengelolaan energi yang terbarukan di hotel-hotel, restoran dan unit-unit usaha pariwisata lainnya di kawasan wisata Pangandaran. Serta pembuatan penggerak turbin untuk sumber energi yang dirancang sehingga ramah lingkungan di Bulaksetra.

3. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Pangandaran sebesar 1,2 juta wisatawan, baik wisatawan lokal maupun

mancanegara hingga pertengahan tahun 2014 (Wawancara, Bpk. Khairul, INDECON).

Terjalinnya kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO dalam pengembangan sektor pariwisata di Pangandaran tersebut merupakan cerminan dari tujuan UNWTO, yaitu untuk meningkatkan pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam sektor industri pariwisata, yang diyakini merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah, serta turut mempromosikan perdamaian antar negara-negara didunia. Dan untuk menciptakan tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Berkaitan dengan peran serta berbagai pihak yang telah mendukung program ini, diberikan apresiasi kepada hotel dan pemangku kepentingan dalam rangka merayakan keberhasilan program STREAM, juga dilakukan peninjauan hasil kegiatan penghijauan dan pemanfaatan energi yang dilakukan di Bulaksetra, tak jauh dari lokasi Pangandaran. Lokasi ini merupakan sebuah sarana dimana masyarakat dapat membudidayakan mangrove, serta menikmati kebun hijau dengan udara bersih. Terdapat penggerak turbin yang dirancang sedemikian rupa sehingga ramah lingkungan.

Diharapkan, pengembangan pariwisata berkelanjutan memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat serta flora dan fauna di Pangandaran. Disamping itu dapat mendukung percepatan pergerakan ekonomi pariwisata yang pada gilirannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jumlah Wisatawan Pangandaran Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah Wisatawan		Persentase (%)
	WISNUS (Wisatawan Nusantara)	WISMAN (Wisatawan Mancanegara)	
2011	725.690	4.932	64.02%
2012	1.118.574	4.453	113.79%
2013	1.283.476	4.281	121.33%
2014	1.309.200	4.059	161.80%

Sumber: (Dokumen Dinas Pariwisata Ciamis, Jawa Barat).

Dari tabel 4.2 terlihat setiap tahun terjadi perkembangan jumlah wisatawan akibat dari hasil Kerjasama Indonesian dengan UNWTO dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM di Pangandaran. Kepariwisataan yang berkembang saat ini telah menjadi salah satu penggerak perekonomian setiap negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, pariwisata telah menjadi sektor strategis dalam memperkuat perekonomian negara dan merupakan elemen dalam pemerataan pembangunan dari aspek kewilayahan. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pemasukan devisa negara Indonesia dari sektor pariwisata pada tahun 2011 adalah sebesar US$7 milyar, dengan kedatangan 7 juta turis mancanegara. Dengan demikian, sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor penyumbang devisa negara terbesar ketiga setelah sektor migas dan non migas (kelapa sawit). Dengan kontribusi positif tersebutlah yang menjadikan sektor pariwisata berperan menjadi lokomotif bagi upaya pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta revitaliasi perekonomian Indonesia.

Salah satu destinasi wisata yang potensial di Indonesia adalah kawasan wisata Pangandaran yang terletak di kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Namun pada tahun 2012, kecamatan Pangandaran resmi berdiri menjadi sebuah kabupaten yang baru berdasarkan Perda No.21 Tahun 2012. Pangandaran memiliki tempat-tempat objek wisata yang beranekaragam, baik wisata alam, budaya ataupun minat khusus. Objek wisata pantai Pangandaran dan sekitarnya merupakan objek wisata yang paling terkenal dan diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal tersebut dapat dibuktikan dari jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai 161.80% wisatawan di tahun 2014.

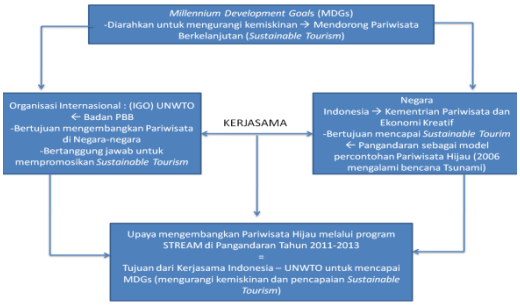
Akan tetapi jumlah kunjungan tersebut sempat mengalami penurunan akibat bencana gempa dan tsunami yang melanda Pangandaran dan sekitarnya pada 17 Juli 2006. Akibatnya, jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis, dengan hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp.149.664.400,- pada bulan Agustus hingga Desember 2006. Selain itu, bencana gempa dan tsunami tersebut juga mengakibatkan hancur dan rusaknya seluruh fasilitas, sarana dan prasarana di objek-objek wisata di Pangandaran. Dengan penurunan kunjungan tersebut, maka hal tersebut juga berdampak pada pendapatan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari keberlangsungan kegiatan pariwisata. Berkat program kerjasama ini, jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara kembali meningkat hingga pertengahan tahun 2014. Program STREAM juga telah berhasil dalam memperdayakan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata di Pangandaran. Selain itu, program STREAM juga telah berhasil dalam memberikan solusi efektif pada hotel-hotel, restoran maupun unit usaha pariwisata lainnya, baik berskala kecil maupun besar dalam hal penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan. Dengan keberhasilan atas terlaksananya program ini, maka dapat menjadi acuan maupun contoh bagi negara lain untuk dapat diterapkan di destinasi-destinasi wisata lainnya di luar Pangandaran.

4.1.3 Analisa Hasil Penelitian

Kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) sudah sesuai dengan pola interaksi Hubungan Internasional, dimana ada Negara (Indonesia) sebagai *state actor* dan Organisasi Internasional (*United Nations World Tourism Organization* - UNWTO) sebagai *non-state actor*. Pola hubungan atau interaksi ini berupa kerjasama (*cooperation*). Kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO termasuk kedalam Kerjasama Multilateral. Indonesia sebagai negara menjalin kerjasama dengan UNWTO sebagai Organisasi Internasional, dimana tujuan UNWTO adalah untuk mengembangkan pariwisata di Negara-negara berkembang. Tujuan dari kerjasama Indonesia dan UNWTO saling berkesinambungan, yaitu berupaya untuk mengembangkan Pariwisata Hijau melalui program STREAM di Pangandaran.

Dalam kaitannya dengan Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional, pariwisata sangat berkaitan dengan lingkungan, baik buruknya kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kegiatan wisata dan jumlah wisatawan itu sendiri. Pariwisata merupakan salah satu industri yang tidak luput dari tuntunan aplikasi pengembangan industri berwawasan pemeliharaan alam (konservasi) yang *sustainable* (berkelanjutan). Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah sebuah konsep turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ada pada laporan *World Commission on Environment and Development*, berjudul *Our Common Future* (atau lebih dikenal dengan *the Brundtland Report*) yang diserahkan ke lembaga PBB pada tahun 1987.

Analisa Penelitian



Dalam Gambar 4.7, program-program pengembangan kepariwisataan Indonesia dan UNWTO berkontribusi langsung bagi pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* - MDGs). Indonesia sebagai aktor negara menjadikan Pangandaran sebagai *role* model untuk pengembangan Pariwisata Hijau, dimana tujuannya adalah untuk mencapai Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) yang mengarah pada MDGs. Hal yang serupa, UNWTO sebagai Organisasi Internasional dimana tujuannya mengembangkan pariwisata di Negara-negara terutama negara yang tempat wisatanya mengalami bencana alam, dan bertanggungjawab mempromosikan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*). Maka upaya untuk untuk mengembangkan Pariwisata Hijau melalui STREAM di Pangandaran artinya sesuai dengan tujuan kerjasama Indonesia dengan UNWTO untuk mencapai arahan MDGs.

Sektor pariwisata sebagai industri jasa merupakan sektor yang sangat peka terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran limbah domestik, kumuh, adanya gangguan terhadap wisatawan, penduduk yang kurang atau tidak bersahabat, kesemerautan lalulintas, kriminalitas, dan lain-lain, akan dapat mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Oleh karena itu pengembangan pariwisata harus menjaga kualitas lingkungan.

UNWTO mempromosikan *green tourism* sebagai salah satu obyek penarik wisatawan, sekaligus sebagai program untuk melestarikan alam. Dalam mengembangkan pariwisata hijau, terdapat beberapa peluang, diantaranya:

1. Meningkatnya permintaan pasar internasional dan nasional pada produk (paket tur maupun akomodasi) yang ramah lingkungan.

2. Perkembangan ekonomi Indonesia relatif stabil dan meningkat.

3. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia dan wisatawan domestik yang berlibur di Indonesia.

4. Meningkatnya jumlah perusahaan penerbangan yang melayani rute ke kawasan-kawasan yang memiliki daya tarik wisata.

5. Meningkatnya jumlah penerbangan berbiaya murah, sehingga meninngkatkan animo berwisata karena keterjangkauan biaya.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari kerjasama Indonesia dengan UNWTO yaitu untuk mengembangkan Pariwisata Hijau melalui program STREAM di Pangandaran. Indonesia melalui (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) bekerjasama dengan Mitra Utama seperti INDECON (*Indonesia Ecotourism Network*), IESR (*Institute for Essential Services Reform*, Indonesia), Adelphi. Dan Mitra Lokal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis, *Local Working Group* (LWG) Pangandaran, dan masyarakat Pangandaran.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari paparan pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Kerjasama Indonesia - UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM di Pangandaran, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi pariwisata di Pangandaran pada tahun 2007 setelah tsunami pada tahun 2006 banyak mengalami kerusakan. Perkembangan pariwisata yang ada di Kawasan Wisata Pangandaran dapat dilihat dari data komponen-komponen pariwisata, yaitu jumlah kedatangan wisatawan, jumlah akomodasi, dan jumlah rumah makan yang ada. Sebanyak 63 unit akomodasi mengalami kerusakan. Bencana alam tsunami juga berdampak pada jumlah wisatawan, jumlah wisatawan pada tahun 2007 hingga 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelum terjadi tsunami di Pangandaran.

2. STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) sebagai bentuk kerjasama yang terjalin antara UNWTO dengan Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata hijau di Pangandaran. Kesepakatan kerjasama tersebut berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta pada tanggal 13 Juni 2011 dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Kementerian, Pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis, masyarakat Pangandaran dan lembaga internasional. Program tersebut merupakan program pengembangan pariwisata yang mendukung *green tourism - sustainable tourism*. Program efisiensi energi untuk pariwisata berkelanjutan tersebut dilakukan dengan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi. Kawasan wisata Pangandaran dipilih karena lokasi ini memainkan peranaan penting dalam pembangunan daerah. Namun akibat bencana tsunami tahun 2006, pariwisata di Pangandaran merosot tajam, bahkan semua fasilitas dan sarana pendukung pariwisata di kawasan tersebut rusak. Sehingga, hal inilah yang melatarbelakangi hadirnya program STREAM, yang merupakan program pertama di Indonesia. Kegiatan utama dalam program STREAM di Pangandaran mencakup kegiatan mitigasi dan adaptasi. Dalam kegiatan mitigasi, terdapat dua kegiatan yang dilakukan, yaitu reduksi emisi karbon di industri hotel dan pengembangan energi terbarukan untuk fasilitas pariwisata. Sedangkan dalam kegiatan adaptasi, terdapat tiga kegiatan pokok, yaitu penanaman mangrove dan terumbu karang, peningkatan kesadaran publik dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan tanggap terhadap perubahan iklim.

3. Dalam kerjasama Indonesia - UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui program STREAM di Pangandaran dapat dikatakan berhasil, namun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi berbagai pihak, kendala yang utama adalah masyarakat tidak mengetahui apa itu STREAM, masyarakat tidak memahami, dikarenakan penggunaan bahasa yang kurang dapat dicerna oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak mengetahui betul program STREAM, masyarakat lebih mengenal program STREAM dengan sebutan Program Hemat Energi. Yang kedua, pada saat itu Pemerintah Indonesia melihat program dari UNWTO ini bisa mengambil alih ranah. Karena UNWTO membentuk kelompok yaitu LWG (*Local Working Group*), LWG ini diberikan SK oleh Bupati, ketika proses bekerja datangnya bukan ke Dinas Pariwisata, namun kje LWG, LWG bekerja dilapangan sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan.

4. Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata hijau di Pangandaran, kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dengan UNWTO selama 3 tahun, terhitung mulai tahun 2011 hingga 2013, melalui program STREAM (*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) dinilai berhasil. Indikator-indikator keberhasilan tersebut dapat terlihat dari sarana dan prasarana yang lebih layak dan memadai, peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata di Pangandaran, serta partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Dalam hal penurunan penggunaan energi sangat berkurang 60% sampai dengan 70%. Dalam penggunaan listrik di hotrl-hotel, restoran, dan lain-lain. Keberhasilan masyarakat desa Babakan, Pangandaran dalam mengikuti PNPM Pariwisata (Program Nasional Pemberdayaan Pariwisata) yang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.75 juta. Dalam program tersebut, masyarakat desa Babakan berhasil mendapatkan kesempatan untuk memajukan desa mereka dengan meningkatkan fasilitas, seperti memperbaiki "Saung Edukasi Mangrove Bulaksetra", pemasangan jalan setapak di kawasan Mangrove Bulaksetra, dan pelatihan kepemanduan wisata oleh kelompok pemandu wisata Bulaksetra. Terdapat 17 program PNPM yang dimulai sejak 4 November 2013. Dengan adanya bantuan dana tersebut, maka dapat meningkatkan sarana dan perbaikan fasilitas di kawasan wisata Pangandaran, sehingga wisatawan yang berkunjung meningkat. Penerapan energi terbarukan dan

sistem pengelolaan energi yang terbarukan di hotel-hotel, restoran dan unit-unit usaha pariwisata lainnya di kawasan wisata Pangandaran. Serta pembuatan penggerak turbin untuk sumber energi yang dirancang sehingga ramah lingkungan di Bulaksetra. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Pangandaran sebesar 1,2 juta wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara hingga pertengahan tahun 2014. Terjalinnya kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO dalam pengembangan sektor pariwisata di Pangandaran tersebut merupakan cerminan dari tujuan UNWTO, yaitu untuk meningkatkan pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam sektor industri pariwisata, yang diyakini merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah, serta turut mempromosikan perdamaian antar negara-negara didunia. Dan untuk menciptakan tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan, baik karena keterbatasan kapabilitas penulis, maupun kendala-kendala non teknis. Dalam kesimpulan diatas, peneliti hendak memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

1. Untuk Pemerintah Indonesia, hendaknya bersifat cepat tanggap dalam mengatasi pemulihan Pangandaran pasca Tsunami, dengan menyiapkan perencanaan yang matang berikut Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang tersebut dan melakukan upaya-upaya yang efektif untuk program edukasi bagi masyarakat lokal.

2. Untuk Pemerintah Indonesia, diharapkan agar kerjasama dengan UNWTO dalam program STREAM dapat dijalankan diwilayah lain di Indonesia. Diharapkan kebijakan Pemerintah dapat sejalan sesuai dengan proses kerja para mitra-mitra dalam program STREAM seperti IESR, INDECON, dan mitra lokal agar setiap kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pola komunikasi Pemerintah Indonesia (Kementrian Pariwisata), UNWTO, dan mitra lainnya hendaknya bersifat proaktif, agar upaya dalam mengimplementasikan program STREAM dapat lebih mendetail dan spesifik sehingga mengetahui akar permasalahannya.

3. Dalam pengembangan pariwisata diperlukan kerjasama atau partnership antara pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal di samping dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang merata dan juga dapat mengurangi pengangguran.

4. Untuk UNWTO, diharapkan agar lebih mempromosikan program STREAM dan dapat mencapai tujuan-tujuan UNWTO sendiri dalam hal perkembangan pariwisata, khususnya di Indonesia. Pemberian pemahaman atau seminar untuk masyarakat lebih ditingkatkan agar masyarakat lokal yang ikut dalam program STREAM memahami betul apa yang sedang dikerjakan.

5. Untuk masyarakat luas, hendaknya lebih aktif dalam upaya pengembangan pariwisata hijau, karena partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dari pariwisata itu sendiri, diharapkan agar dapat menjaga kawasan pariwisata di Pangandaran, merawat, dan melestarikan alam sekitar. Menjalankan dan ikut mendukung *Green Tourism* agar tercipta Pariwisata yang berkelanjutan.

6. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meninjau kembali mengenai *Green Tourism.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Betsill, Michele M and Elisabeth Corel (Ed). 2008. *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. Cambridge: The MIT Press.

Greene, Owen. 2001. *Environmental Issues, in Jhon Baylis & Steve Smith* (eds) *The Globalization of World Politics*. Oxford.

Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internsional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kurniawati, Rina. *Modul Pariwisata Berkelanjutan*. 2013.

Mowforth, M. dan Munt, I. 2003. *Tourism and Sustainability*. London: *Routledge*.

Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung : PT Refika Aditama.

_____. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah – Masalah Global*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Soemarwoto. 2001. *Atur Diri Sendiri*. Cetakan Kedua. Gajah Mada University
Press. Yogyakarta.

Sugiono, Muhadi. 2006. *Global Governance Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta.

Steans, Jill et al., 2005. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, edisi ke-2. Pearson & Longman, Chap.

Paterson, Matthew, 2001. Green Politics, dalam Scott Burchill et al., *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.

Wardhana, W.A., 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Institute for Essential Services Reform (IESR). Pariwisata Berkelanjutan Melalui Efisiensi Energi dengan Tindakan-Tindakan Adaptasi dan Mitigasi di Pangandaran (STREAM).

Udhiantari, Luh Putu Emi. 2002. *Ekowisata Sebagai Alternatif dalam Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan di desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali*. Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

C. PUBLIKASI

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Identifikasi Program atau Kegiatan dan Usulan Pendanaan dalam Rangka Rehabilitasi Wilayah Pasca gempa Bumi dan Tsunami Pangandaran dan Sekitarnya*. 2007.

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. 2013.

Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran. STREAM Brochure in Indonesia. 2010.

Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran. STREAM Bulletin. 2012.

D. BUKU KEBIJAKAN DAN PERUNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 50 Tahun 2011. Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2009. Tentang Kepariwisataan.

E. RUJUKAN ELEKTRONIK

Abdi Sapta Gelora Aritonang. 2012. *Kajian Isu Pemanasan Global, Sebuah Kritik Terhadap Studi Lingkungan Hidup Dalam Paradigma Hubungan Internasional*. Melalui http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697 &type=10 [23/2/15].

Alamendah. *Daftar Situs Warisan Dunia di Indonesia*. Melalui http://alamendah.org/2010/06/24/daftar-situs-warisan-dunia-di-indonesia/ [18/1/15].

Angela Ariani. 2013. *Pariwisata Berwawasan Alam Hijau Tanggung Jawab Segenap Elemen Pelaku Usaha Pariwisata*. Melalui http://www.ampta.ac.id/pariwisata-alam-hijau#.VR__xY5EvL0 [6/3/15].

Ardin Silalahi. 2010. *Ekoturisme dan Pemanfaatan Potensi Lokal*. Melalui http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2010/07/08/ekoturisme-dan-pemanfaatan-potensi-lokal-188481.html [25/2/15].

Ary S. Suhandi. 2013. *Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Hijau*. Melalui http://apgreenjobs.ilo.org/resources/ [6/3/15].

Badan Informasi Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. 2012. *Pariwisata sebagai Sektor Penting dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Melalui http://pariwisata.jogjakota.go.id/index/extra.detail/2333 [25/2/15].

Dartyanto Atmojo. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Melalui http://www.academia.edu/4938476/Bab_13_Pertumbuhan_Ekonomi_Dalam_Konsep_Pembangunan_Berkelanjutan_420 [7/3/15].

Dian Purnaningrum. 2012. *Pemahaman Pariwisata Indonesia*. Melalui http://www.aptjakarta.ac.id/html/index.php?id=artikel&kode=25 [18/1/15].

John Paul Manik. 2012. Peran United Nationas World Tourism (UNWTO) dalam Program Pemberantasan Eksploitasi anak. Melalui http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3227/jurnal.pdf?sequence=1 [2/3/15].

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2012. *Jaringan Informasi dan Dokumentasi*. Melalui http://jdih.menlh.go.id/pdf [2/3/15].

Kementrian Luar Negri. 2014. *Geliat Sektor Pariwisata* ASEAN. Melalui http://www.kemlu.go.id/ [18/1/15].

Pemandu Informasi Perkembangan Dunia. 2015. *The Global Review*. Melalui http://www.theglobal-review.com/ [4/3/15].

Resky Ningsih. 2014. *Ekologi Pariwisata*. Melalui http://www.academia.edu/8018953/Ekologi_Pariwisata [6/3/15].

Rizal Kurniasih. 2013. *Kerusakan Lingkungan Akibat Reklamasi Pantai Demi Pembangunan Industri Pariwisata*. Melalui http://www.academia.edu/8776867/ [23/2/15].

Ruslan Rahim. 2014. *Wawasan Kemaritiman dalam Potret Bidang Ekonomi* Melalui http://www.academia.edu/7472124/Wawasan_Kemaritiman_Tinjauan_Ekonomi [31/3/15].

STREAM. *About STREAM*. Melalui http://www.streamindonesia.org/ [24/2/15].

Tentang Pangandaran. Melalui http://www.mypangandaran.com/wisata/detail/5/pantai-pangandaran.html [25/2/15].

T Jack Rimbawan. 2010. *Panduan Wisata Pengamatan Primata*. Melalui http://www.scribd.com/doc/256862504/Panduan-wisata-pengamatan-primata#scribd [31/3/15].

Upit. 2013. *Liburan Hijau Dengan Petualangan Ekowisata*. Melalui http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2013/07/26/liburan-hijau-dengan-petualangan-ekowisata-bahari-pulau-serangan-denpasar/ [31/3/15].

Vietha Hartanty. 2012. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. Melalui http://www.academia.edu/7701501/STRATEGI_PENGEMBANGAN_PARIWISATA_DI_INDONESIA [10/02/16].

Pariama Hutasoit. 2009. *Pariwisata dan Perubahan Lingkungan*. Melalui http://www.goblue.or.id/kategori/berita/page/112 [30/3/15].

WATA. *World Association of Travel Agencies*. Melalui http://www.wata.net/ [30/01/16].